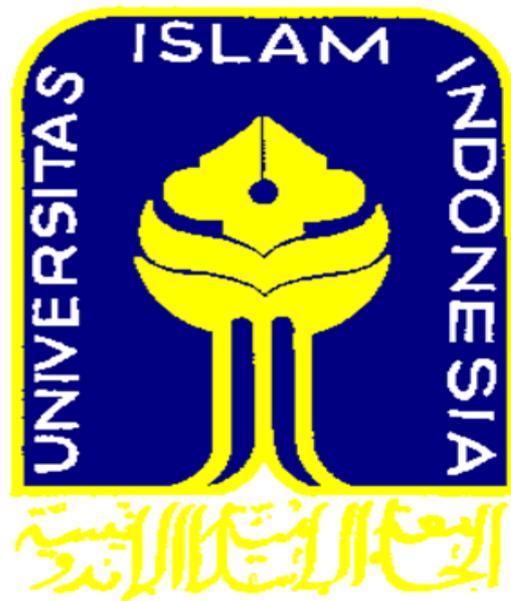


**ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENYERAPAN TENAGA KERJA DI PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2010 - 2016**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

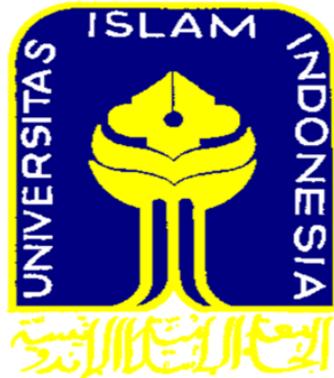
**Nama : Graine Meytha Afrigesti
NIM : 14313005
Jurusan : Ilmu Ekonomi**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI
YOGYAKARTA
2018**

**ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENYERAPAN TENAGA KERJA DI PROVINSI JAWA TENGAH**

TAHUN 2010 - 2016

SKRIPSI



Disusun Dan Diajukan Untuk memenuhi Syarat Ujian Akhir Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Jenjang Sastra 1

Jurusan Ilmu Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama : Graine Meyha Afrigesti

Nomer Mahasiswa : 14313005

Jurusan : Ilmu Ekonomi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI

YOGYAKARTA

2018

HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

iii

HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang dapat dikategorikan dalam tindakan plagiasi seperti dimaksud dalam buku pedoman penulisan skripsi Program Studi Ilmu Ekonomi FE UIL. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka Saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 2018

Penulis,



Graine Meytha Afrigesti



HALAMAN PENGESAHAN

iv

HALAMAN PENGESAHAN
ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENYERAPAN TENAGA KERJA DI PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2010 - 2016

Nama : Graine Meytha Afrigesti
Nomor Mahasiswa : 14313005
Jurusan : Ilmu Ekonomi

Yogyakarta, April 2018

Telah disetujui dan disahkan oleh Dosen Pembimbing



Dr. Jaka Sriyana, SE.,M.Si.

HALAMAN BERITA ACARA

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYERAPAN TENAGA
KERJA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2010-2016**

Disusun Oleh : GRAINE MEYTHA AFRIGESTI

Nomor Mahasiswa : 14313005

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Senin, tanggal: 21 Mei 2018

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Jaka Sriyana, SE., M.Si., Ph.D.

Penguji : Ari Rudatin, Dra., M.Si.


.....
Ari Rudatin
.....

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Dr. D. Agus Harjito, M.Si.

HALAMAN MOTTO

“Rabbisy-Rohli Shadrii, Wa Yassieli Amrii, Wahlul ‘Uqdatam Millisaanii,
Yafqahu Qauli”

(QS Thaahaa : 25-28)

“Ibumu, Ibumu, Ibumu baru kemudian Ayahmu”

(HR.Bukhari no. 5971 dan muslim no. 2548)

“From nothing to something”

(penulis)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil alamin, menadahkan kedua tanganku sebagai doa dalam syukurku yang tiada henti atas ridho dan izinmu terima kasihku untukmu. Karya ini ku persembahkan untukmu Ibuku Ayahaku dan Adikku tersayang yang tiada henti selalu mendoakanku di setiap sujudnya, memberikan dukungan, motivasi dalam hidupku dan selalu menjadi semangatku untuk menyelesaikan tanggung jawabku sebagai putri Ibu dan Ayah. Ibu, Ayah terimalah karya ini sebagai bukti keseriusan untuk mewujudkan harapan kalian untukku dan membalas semua pengorbanan Ibu, Ayah yang telah kalian lakukan untuk aku putrimu dari aku berada di dalam kandungan hingga sekarang tumbuh dewasa. Dan seluruh Dosen Fakultas Ekonomi khususnya Ilmu Ekonomi yang telah memberikan berbagai macam ilmu yang sangat berarti untuk saya ke depannya. Terima kasih juga saya ucapkan kepada teman-teman dan para Staff Fakultas Ekonomi yang telah mebantu selama menjadi mahasiswa di Fakultas Ekonomi.

HALAMAN KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur kepada Allah SWT Tuhan semesta alam atas segala karunia dan rahmat-Nya yang telah diberikan. Sehingga dengan rahmat-Nya penulis dapat dan mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 - 2016”. Penulisan skripsi ini adalah salah satu syarat unuk meraih gelar sarjana ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Semoga hasil ini bermanfaat untuk banyak pihak dan mendapatkan Ridha-Nya.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan, sehingga semua bentuk kritik maupun saran yang membangun sangat diharapkan penulis demi kesempurnaan skripsi ini. Skripsi ini merupakan karya yang tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan dan bantuan dari banyak pihak, oleh karena itu penulis ingin berterimakasih kepada:

1. Kedua orang tua ku, Ayahku Afrizal Dharma dan Nanang Zainudin dan Ibuku Gustiningsih yang telah memberikan kasih sayang, kebahagiaan, semangat dalam hidupku, nasihat, motivasi dan mendoakanku di setiap sujudnya yang tidak akan akan pernah berhenti.
2. Kedua adik saya, Retsy Febinia Afrigesti dan Lutfia Salsabillah yang selalu memberikan semangat dalam hidup saya.
3. Untuk Nenek dan Kakekku serta keluarga besar di Batam, Bunda, Om Munif, Najwa, Faizi yang selalu mendoakan.
4. Bapak Dr. Jaka Sriyana, SE., M.Si. selaku dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia dan dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu untuk membantu membimbing dalam penyusunan skripsi dengan sabar.
5. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, selaku Rektorat Universitas Islam Indonesia.
6. Untuk Muhammad Arief yang selalu membantu, menemaniku dan memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi sampai larut pagi.

7. Untuk Febritista Yubinas dan Khairani Afri yang selalu membantu dalam pengerjaan skripsi ini serta memberikan doa dan semangat dalam menyelesaikan skripsi.
8. Untuk temen seperjuanganku selama masa perkuliahan Shafira Aini, Belia, Herviana, Nawaf, Naufal, Bagas, Alfian, Ichsan, Qodri yang memberikan semangat dan dukungan dari awal hingga akhir perkuliahan.
9. Dan teruntuk teman-teman yang tidak bisa disebutkan namanya satu-satu terimakasih banyak selalu memberikan semangat dan dukungan untuk saya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sehingga sumbang fikir dan koreksi akan sangat bermanfaat dalam melengkapi dan menyempurnakan langkah-langkah lanjut demi hasil yang lebih baik. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua pihak. Amin

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Yogyakarta, Mei 2018

Penulis,

Graine Meytha Afrigesti

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN BERITA ACARAHALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL	xiii
HALAMAN ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	7
2.1 Kajian Pustaka.....	7
2.2 Landasan Teori	10
2.2.1 Tenaga Kerja.....	10
2.2.2 Kesempatan Kerja.....	10
2.2.3 Permintaan Tenaga Kerja.....	11
2.2.4 Inflasi	13
2.2.5 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	15
2.2.6 Upah Minimum Kabupaten / Kota	16
2.2.7 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	18
2.2.8 Angkatan Kerja	18
2.2.9 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).....	20
2.3 Hubungan Antara Variabel Independen dengan Variabel Dependen	20
2.3.1 Hubungan antara Inflasi dengan Penyerapan Tenaga Kerja.....	20
2.3.2 Hubungan antara PDRB dengan Penyerapan Tenaga Kerja.....	21

2.3.3 Hubungan antara UMK dengan Penyerapan Tenaga Kerja	21
2.3.4 Hubungan antara IPM dengan Penyerapan Tenaga Kerja.....	23
2.3.5 Hubungan antara APBD dengan Penyerapan Tenaga Kerja	24
2.4 Hipotesis Penelitian.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	27
3.1 Jenis dan Sumber Data	27
3.2 Definisi Operasional Variabel	27
3.3 Metode Analisis.....	29
3.4 Estimasi Regresi Data Panel	30
3.5 Penentu Model Estimasi.....	32
3.6 Uji Statistik.....	32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	35
4.1 Deskripsi Data Penelitian.....	35
4.2 Diskripsi Objek Data Penelitian.....	35
4.3 Analisis Data	39
4.3.1 Pemilihan Model (Teknik Estimasi).....	41
4.4 Uji Statistik	47
4.5 Interpretasi Hasil	50
4.6 Pembahasan.....	51
BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI.....	55
4.1 Kesimpulan.....	55
5.2 Implikasi.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....	57
LAMPIRAN	59

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
1	Permintaan Tenaga Kerja	12
2	Demand – Pull Inflation	14
3	Cost Push Inflation	15
4	Prosedur Pengujian Pemilihan Model	31
5	Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 – 2016	36
6	Jumlah Inflasi di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 – 2016	37
7	Jumlah PDRB di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 – 2016	37
8	Jumlah UMK di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 – 2016	38
9	Jumlah Pengeluaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 – 2016	39

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
1	Jumlah Angkatan Kerja, Penduduk Bekerja, Pengangguran di Provinsi Jawa Tengah	2
2	Penduduk Bekerja dan Pengangguran di Provinsi Jawa Tengah	3
3	Hasil Regresi Data Panel Common Effect Model	40
4	Hasil Regresi Data Panel Model Fixed Effect Model	41
5	Hasil Regresi Data Panel Model Random Effect Model	41
6	Hasil Uji Chow	42
7	Hasil Uji Model Hausman	43
8	Hasil Uji Model Lagrange Multiplier	44
9	Hasil Ringkasan Perbandingan Metode Common Effect, Fixed Effect Dan Random Effect	45
10	Konstanta Antar Daerah	45
11	Konstanta Pertahun (Fixed Effect period)	47
12	Hasil Uji t	47

HALAMAN ABSTRACT

Abstrak: Analisis Faktor – faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 – 2016.

Pembangunan ekonomi tidak lepas dari peran manusia dalam mengelolanya. Manusia merupakan tenaga kerja, input pembangunan, juga merupakan konsumen dari hasil pembangunan itu sendiri. Permasalahan pokok dalam ketenagakerjaan Indonesia terletak pada tingkat kesempatan kerja. Tujuan penelitian ini mendeskripsikan penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah dan menganalisis dengan angka Inflasi, PDRB, UMK, IPM, dan Pengeluaran Pemerintah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Inflasi dan IPM tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja, sedangkan PDRB, UMK, dan APBD berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah.

Kata Kunci: Penyerapan Tenaga Kerja, Inflasi, PDRB, UMK, IPM, APBD

Abstract: Analysis Of Factors Affecting Labor Absorption in Central Java Province

2010 – 2016. Economic development can not be separated from the human role in managing it. Humans are the workforce, construction input, is also a result of consumer development itself. The main problem in Indonesia employment lies in the level of employment. The purpose of this study is to describe the absorption of manpower in Central Java Province and to analyze with the figures of Inflation, PDRB, UMK, IPM, and Government Expenditure. The results of this study show that Inflation and IPM have no significant effect on labor absorption, and PDRB, UMK, and Government Expenditure significantly influence the absorption of manpower in Central Java Province.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi menjadi tujuan disetiap negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Tujuan pembangunan ekonomi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu indikator keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan dalam Produk Domestik Bruto (PDB). Pembangunan ekonomi yang mengalami pertumbuhan yaitu apabila tingkat kegiatan ekonomi masa sekarang lebih tinggi daripada yang dicapai pada masa sebelumnya dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia . Pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi dapat berlangsung melalui berbagai jalur antara lain ketenagakerjaan. Pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat bila mampu menciptakan lapangan kerja dalam jumlah dan kualitas yang memadai agar dapat menyerap tambahan angkatan kerja yang memasuki pasar kerja setiap tahun. Perluasan penyerapan tenaga kerja diperlukan untuk mengimbangi laju pertumbuhan penduduk usia muda yang masuk ke pasar tenaga kerja . ketidak seimbangan antara pertumbuhan angkatan kerja dan penciptaan lapangan kerja akan menyebabkan tingginya angka pengangguran. Kemudian meningkatnya angka pengangguran akan mengakibatkan pemborosan sumber daya dan potensi angkatan kerja yang ada meningkatnya beban masyarakat, merupakan sumber utama kemiskinan dan mendorongnya terjadinya peningkatan keresahan social

serta menghambat pembangunan ekonomi dalam jangka panjang (Depnakertrans, 2004)

Tabel 1. 1
Jumlah Angkatan Kerja, Penduduk Bekerja, Pengangguran
di Provinsi Jawa Tengah (Jiwa)

Tahun	Bekerja	Pengangguran	Total Angkatan Kerja
2010	15.809.447	1.046.883	16.856.330
2011	15.822.765	1.203.342	17.026.107
2012	16.531.395	982.093	17.513.488
2013	16.469.960	1.054.062	17.524.022
2014	16.550.682	996.344	17.547.026
2015	16.435.142	863.783	17.298.925
2016	17.186.674	823.938	18.010.612

Sumber : BPS, Provinsi Jawa Tengah dalam angka 2010 – 2016

Pada Tabel 1.1 menunjukkan kondisi angkatan kerja , penduduk bekerja, pengangguran dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2016. Dari tabel diatas menunjukkan bahwa adanya kenaikan yang signifikan dari tiap tahun. Hal ini menunjukkan bahwa adanya tenaga kerja yang ditawarkan pada pasar tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah semakin meningkat dan membaik. Namun dapat dilihat bahwa tenaga kerja yang ada belum terserap dengan baik dalam perekonomian dikarenakan angka pengangguran masih tersedia dalam tabel diatas pada setiap tahunnya yang diiringi dengan jumlah angkatan kerja yang terus bertambah.

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang berpotensi besar bagi perekonomian di Indonesia karena memiliki sumber daya manusia dan alam yang melimpah. Jumlah penduduk di Provinsi Jawa Tengah,

berdasarkan Badan Pusat Statistika (BPS) Jawa Tengah pada tahun 2015 berjumlah 33,774.14 Jiwa. Potensi lapangan pekerjaan yang meningkat akan meningkatkan pembangunan ekonomi yang berdampak baik bagi masyarakat Jawa Tengah dengan menciptakan lapangan kerja bertujuan untuk mengurangi pengangguran.

Tabel 1. 2

Penduduk Bekerja dan Pengangguran di Provinsi Jawa Tengah (Jiwa)

Tahun	Bekerja	Pengangguran
2010	15.809.447	1.046.883
2011	15.822.765	1.203.342
2012	16.531.395	982.093
2013	16.469.960	1.054.062
2014	16.550.682	996.344
2015	16.435.142	863.783
2016	17.186.674	823.938

Sumber : BPS, Jawa Tengah

Dari latar belakang dan permasalahan – permasalahan yang dipaparkan, maka penelitian ini akan menganalisis faktor –faktor yang mempengaruhi penyerpan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2010 sampai dengan 2016.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti membuat beberapa rumusan masalah penelitian diantaranya adalah :

1. Bagaimana pengaruh Inflasi terhadap Kesempatan Kerja di Provinsi Jawa Tengah ?
2. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Kesempatan Kerja di Provinsi Jawa Tengah ?
3. Bagaimana pengaruh Upah Minimum Kabupaten / Kota terhadap Kesempatan Kerja di Provinsi Jawa Tengah ?
4. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kesempatan Kerja di Provinsi Jawa Tengah ?
5. Bagaimana pengaruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terhadap Kesempatan Kerja di Provinsi Jawa Tengah ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaruh Inflasi terhadap kesempatan kerja di Provinsi Jawa Tengah
2. Menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap kesempatan kerja di Provinsi Jawa Tengah
3. Menganalisis pengaruh Upah Minimum Kabupaten / Kota terhadap kesempatan kerja di Provinsi Jawa Tengah
4. Menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap kesempatan kerja di Provinsi Jawa Tengah

5. Menganalisis pengaruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terhadap kesempatan kerja di Provinsi Jawa Tengah

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis, sebagai syarat memperoleh gelar S-1, Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi di Universitas Islam Indonesia dan untuk memahami serta mendalami masalah ketenagakerjaan yang selalu berkembang.
2. Bagi Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, dapat menjadi bahan referensi untuk pengambil keputusan dalam menentukan kebijakan dalam rangka mengatasi permasalahan ketenagakerjaan khususnya di Provinsi Jawa Tengah.
3. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dapat dijadikan sebagai salah satu sumber informasi bagi penelitian yang akan dilakukan pada tahun-tahun berikutnya

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam skripsi ini terdiri dari lima bab. Adapun sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut :

1. Bab 1 Pendahuluan

Isi Pendahuluan adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan

2. Bab II Kajian Pustaka dan Landasan Teori

Kajian pustaka merupakan pengkajian dari hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Sedangkan landasan teori mencakup teori-teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang ada.

3. Bab III Metode Penelitian

Metode penelitian memaparkan mengenai jenis dan cara mengumpulkan data, definisi operasional variabel, dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian.

4. Bab IV Hasil dan Analisis

Hasil dan Analisis terdapat dua subbab yaitu diskripsi data penelitian yang berupa pemaparan data yang digunakan dalam penelitian dan hasil serta analisis yang merupakan temuan yang dihasilkan dalam penelitian dan analisisnya.

5. Bab V Simpulan dan Implikasi

Simpulan dan implikasi merupakan simpulan dari hasil analisis yang dilakukan sebelumnya. Implikasi merupakan hasil dari simpulan yang digunakan sebagai jawaban atas rumusan masalah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

Sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan variabel serta analisis dalam penelitian ini, maka perlu kiranya merujuk pada penelitian – penelitian terdahulu yang membahas tentang analisis faktor – faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah.

Sobita dan Suparta (2014) dalam penelitiannya membahas tentang pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di Provinsi Lampung. Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis penyerapan tenaga kerja di Provinsi Lampung dimana metode penelitian ini menggunakan analisis data panel. Variabel independen yang digunakan adalah PDRB Rill, Upah Rill, Harga Modal bidang pertanian, dan Indeks Harga Implisit, sedangkan variabel dependent yang digunakan adalah Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Lampung. Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah variabel independen PDRB rill dan harga Modal di bidang pertanian secara signifikan berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Kenaikan PDRB rill dan Modal di bidang pertanian akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Sementara itu variabel Upah rill secara signifikan berpengaruh negative terhadap penyerapan tenaga kerja. Hasil ini menunjukkan bahwa kenaikan Upah rill akan menurunkan Penyerapan Tenaga Kerja.

Pangastuti (2015) dalam penelitiannya membahas tentang faktor – faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian

tersebut bertujuan untuk menganalisis penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah dengan metode penelitian menggunakan regresi linier berganda Metode Random Effect Model (REM). Variabel independen yang digunakan adalah PDRB, UMK, Pendapatan Asli Daerah, Pengangguran Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012, sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah penyerapan tenaga kerja. Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah Hasil penelitian menunjukkan pengaruh PDRB terhadap penyerapan tenaga kerja memiliki hubungan yang negatif. Pengaruh UMK terhadap penyerapan tenaga kerja memiliki pengaruh positif. Pengaruh pengangguran terhadap penyerapan tenaga kerja memiliki pengaruh positif. Pengaruh PAD terhadap penyerapan tenaga kerja memiliki hubungan positif. Nilai probabilitas masing masing variabel yang tidak signifikan yaitu PDRB, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMP), serta Pendapatan Asli Daerah. Variabel yang signifikan yaitu Pengangguran karena nilai probabilitas < dari alpha. Sehingga perlu dikajinya faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Jawa Tengah antara lain jumlah perusahaan, nilai produksi, suku bunga dan lain sebagainya.

Kusuma (2016) dalam penelitiannya membahas tentang faktor – faktor yang mempengaruhi permintaan tenaga kerja di Indonesia, penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis penyerapan tenaga kerja di Indonesia dimana metode penelitian ini menggunakan analisis regresi panel. Variabel independen yang digunakan adalah Upah Minimum Provinsi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angkatan Kerja sedangkan variabel dependent yang digunakan adalah data penduduk berumur 15 tahun ke atas yang termasuk bekerja pada tahun 2006 –

2013. Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah variabel Angkatan Kerja dan IPM secara signifikan berpengaruh positif terhadap permintaan tenaga kerja. Sedangkan variabel UMP tidak berpengaruh terhadap permintaan tenaga kerja.

Putri (2016) dalam penelitiannya membahas tentang faktor – faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Kabupaten / Kota di DIY. Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota DIY dimana metode penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel. Variabel independen yang digunakan adalah PDRB, PMDN, UMP, dan Pengeluaran Pemerintah sedangkan variabel dependent yang digunakan adalah penyerapan tenaga kerja. Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah PDRB, Pengeluaran Pemerintah, UMP berpengaruh signifikan, namun untuk PMDN tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja DIY.

Biamrillah dan Nurhayati (2018) dalam penelitiannya membahas tentang faktor – faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di daerah Karesidenan Semarang. Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis penyerapan tenaga kerja di Karesidenan Semarang dimana metode penelitian ini menggunakan analisis data panel. Variabel independen yang digunakan adalah Jumlah Penduduk, Inflasi, PDRB dan UMK sedangkan variabel dependent yang digunakan adalah penyerapan tenaga kerja di daerah Karesidenan Semarang, adapun hasil dari penelitian tersebut adalah variabel jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap variabel tenaga kerja, PDRB berpengaruh positif terhadap variabel tenaga kerja, Inflasi dan Upah Minimum Kabupaten tidak

berpengaruh terhadap tenaga kerja.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Tenaga Kerja

Tenaga kerja dalam pembangunan merupakan factor yang potensial bagi pembangunan secara keseluruhan. Tenaga kerja adalah daya manusia untuk melakukan pekerjaan. Pengertian umum tersebut sesuai dengan pengertian tenaga kerja yang dimuat dalam Undang – undang Pokok Ketenaga Kerjaan No.14 tahun 1990, yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk pembahasan ini yang dimaksud tenaga kerja adalah angkatan kerja (*labor force*) dan bukan angkatan kerja (*non labor force*) (Sumarsono, 2009).

2.2.2 Kesempatan Kerja

Kesempatan kerja adalah jumlah lowongan tenaga kerja yang dapat di tampung oleh suatu lapangan kerja untuk menghasilkan jumlah output tertentu. Kesempatan kerja ini mempunyai kriteria tertentu bagi calon tenaga kerja yang dapat diterima. Sehingga seringkali kesempatan kerja yang ada, artinya permintaan tenaga kerja pada lapangan kerja tersebut masih menyisakan lowongan kerja. Kemampuan lapangan kerja menyerap jumlah tenaga kerja yang memenuhi kriteria pada lapangan kerja disebut penyerapan tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja dapat sama atau lebih kecil dari kesempatan kerja yang tersedia. Bila penyerapan tenaga sama dengan kesempatan kerja maka tidak akan ada pengangguran. Tetapi jika penyerapan tenaga kerja lebih kecil dari

kesempatan kerja maka akan memunculkan pengangguran kerja (Feriyanto, 2014).

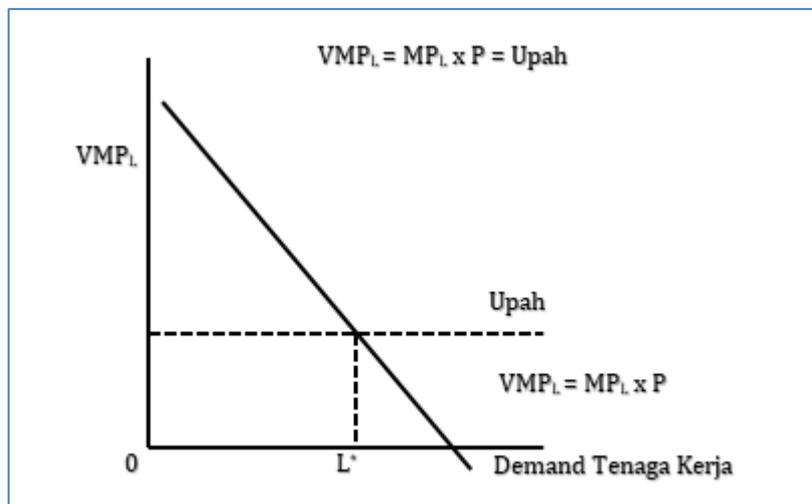
2.2.3 Permintaan Tenaga Kerja

Fungsi permintaan tenaga kerja adalah fungsi yang menjelaskan hubungan antara perubahan tingkat upah tenaga kerja yang dibayarkan perusahaan dan jumlah tenaga kerja yang digunakan oleh perusahaan dalam proses produksi. Kurva permintaan tenaga kerja adalah kurva yang menggambarkan setiap kemungkinan penggunaan jumlah tenaga kerja yang dibeli (dibayar) jasanya oleh pengusaha pada setiap kemungkinan tingkat upah dalam jangka waktu tertentu. Untuk dapat memahami permintaan tenaga kerja dengan baik maka dapat didekati melalui fungsi produksi. Fungsi produksi disederhanakan hanya menggunakan dua factor input produksi $Q = f(K,L)$. K adalah capital atau modal dan L adalah labor atau tenaga kerja (Feriyanto, 2014). Menurut (Mankwi, 2012), ada beberapa hal yang menyebabkan kurva permintaan tenaga kerja bergeser :

1. Harga Output, nilai produk marginal adalah marginal produk dikali harga output perusahaan. Oleh karena itu, ketika harga berubah, nilai produk marginal juga berubah dan kurva permintaan tenaga kerja bergeser.
2. Perubahan Teknologi, kemajuan teknologi menaikkan produk marginal tenaga kerja yang kemudian menaikkan permintaan tenaga kerja. Kemajuan teknologi semacam ini menjelaskan peningkatan ketenagakerjaan secara tetap di hadapan kenaikan upah.
3. Penawaran factor lainnya, ketersediaan jumlah suatu factor produksi dapat memengaruhi produk marginal factor lainnya. Misalnya penurunan

penawaran manga akan mengurangi produk marginal pemeik manga dan kemudian permintaan pemetik mangga.

Permintaan yang banyak akan suatu produk menyebabkan harga produk tersebut naik. Peningkatan harga ini tidak mengubah produk marginal tenaga kerja untuk jumlah tenaga kerja berapa pun, namun meningkatkan nilai produk marginalnya.



Gambar 2. 1 Permintaan Tenaga Kerja

Gambar VMPL, menggambarkan kurva permintaan tenaga kerja karena kurva tersebut dapat menentukan harga maksimum yang akan dibayarkan perusahaan bagi berbagai alternative jumlah tenaga kerja yang digunakan. Kurva permintaan tenaga kerja mempunyai slope negative karena terdapat hubungan negatif antara perubahan upah tenaga kerja dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan perusahaan. Artinya jika terjadi kenaikan upah tenaga kerja maka optimum penggunaan tenaga kerja oleh perusahaan akan berkurang dan sebaliknya.

2.2.4 Inflasi

Inflasi adalah proses kenaikan harga – harga barang secara terus menerus. Kenaikan harga – harga barang umum dapat diukur melalui beberapa indeks di antaranya *Consumer Price Index* (CPI) index yang menunjukkan biaya untuk membeli oleh rumah tangga untuk keperluan hidup, *Wholesale Price Index* (WPI) indeks yang menunjukkan harga sejumlah barang pada tingkat perdagangan besar atau *GNP Deflator*, indeks yang berasal dari pembagian GNP nominal atau harga berlaku dengan GNP riil (Feriyanto, 2014). Adapun jenis – jenis inflasi dijabarkan sebagai berikut (Feriyanto, 2014):

Menurut Sifatnya (Angka Inflasi)

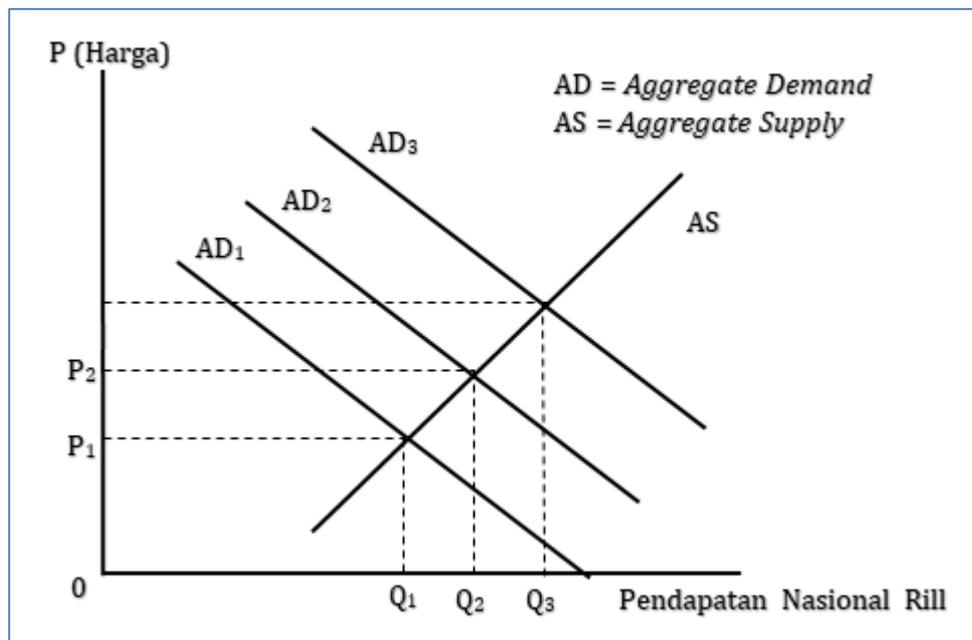
1. *Creeping Inflation* (Inflasi Merayap) adalah inflasi dengan ciri angka inflasi kurang dari 10%
2. *Galloping Inflation* (Inflasi Menengah) adalah inflasi dengan ciri angka inflasi di atas 10% sampai 30%
3. *Hyper Inflation* (Inflasi Tinggi) adalah inflasi dengan ciri angka inflasi di atas 300%

Menurut Asal Inflasi

1. *Imported Inflation* adalah inflasi yang berasal dari luar yang terikat pada harga barang – barang impor
2. *Domestic Inflation* adalah inflasi yang berasal dari dalam suatu Negara domestic yang terikat pada harga barang – barang domestic.

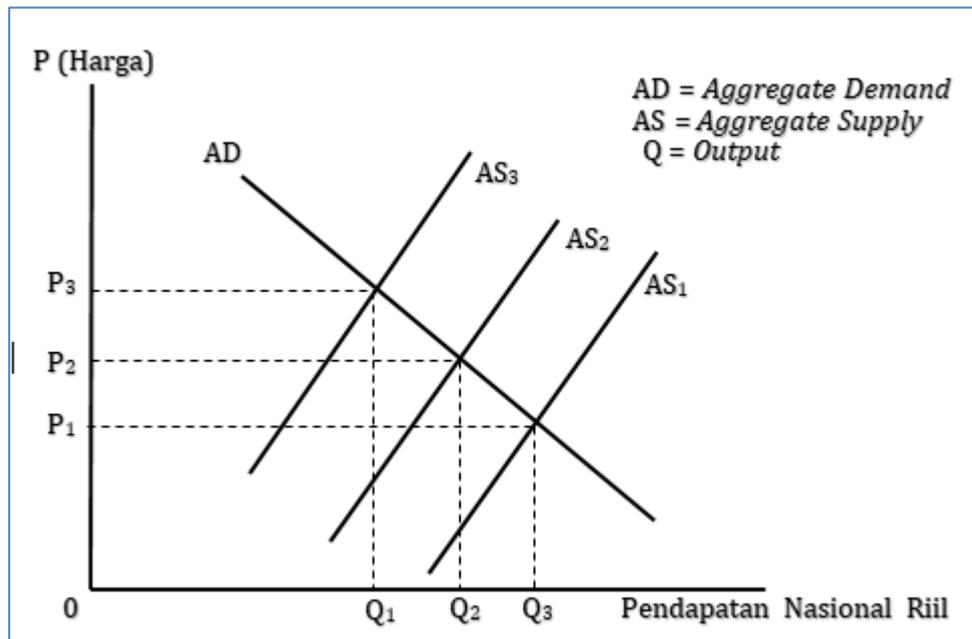
Menurut Sebabnya

1. *Demand-pull Inflation* adalah inflasi karena tarikan permintaan terjadi bilamana perusahaan atau industry tidak mampu dengan cepat memenuhi kenaikan permintaan produk dari masyarakat (konsumen). Terjadinya kekurangan produk akan menyebabkan kenaikan harga – harga produk di pasar.



Gambar 2. 2 Demand – Pull Inflation

2. *Cosh push Inflation* adalah inflasi karena dorongan kenaikan biaya produksi terjadi bilamana perusahaan atau industry mengalami kenaikan harga factor input produksi. Misalnya kenaikan harga bahan baku, kenaikan upah tenaga kerja, dan kenaikan BBM yang digunakan untuk produksi. Akibatnya dengan jumlah modal kerja yang sama akan dihasilkan unit produk yang lebih sedikit dengan harga yang lebih tinggi.



Gambar 2. 3 Cost Push Inflation

2.2.5 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian suatu daerah. PDRB dapat mengukur laju pembangunan ekonomi suatu daerah, hasil yang dapat dilihat adalah produksi barang – barang maupun jasa – jasa, orang – orang atau perusahaan yang ada di perusahaan yang ada di Negara tersebut. Ada 3 cara metode perhitungan PDRB yaitu :

1. Pendekatan Produksi

Pendekatan dengan cara ini dimaksudkan untuk menghitung netto barang dan jasa yang diproduksi oleh seluruh sector ekonomi selama setahun disemua wilayah. Barang dan jasa yang diproduksi ini dimulai dari harga produsen yaitu harga yang belum termasuk biaya transport, sedang biaya pemasaran akan dihitung sebagai pendapatan sector

perdagangan.

2. Pendekatan Pendapatan

PDRB dirumuskan jumlah seluruh balas jasa yang diterima oleh factor produksi (berupa gaji dan upah, bunga, sewa dan laba) yang ikut serta dalam proses produksi suatu wilayah/region dalam jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun, berdasarkan pengertian diatas, maka NTB adalah jumlah dari upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, anak keuntungan, semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya.

3. Pendekatan Pengeluaran

PDRB dihitung jumlah seluruh komponen pengeluaran akhir, meliputi pengeluaran konsumsi rumah tangga dan swasta yang tidak mencari keuntungan, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestic bruto serta ekspor netto didalam suatu wilayah/region dengan jangka tertentu/setahun (Mankwi, 2012).

2.2.6 Upah Minimum Kabupaten / Kota

Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau dilakukan dan dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan atas dasar suatu persetujuan atau peraturan perundang – undang serta dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan karyawan termasuk tunjangan, baik untuk karyawan itu sendiri maupun untuk keluarga. Sesuai dengan Undang – undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 maka upah pekerja disebut dengan istilah UMR atau UMP. Upah minimum tersebut ditetapkan oleh kepala daerah

yaitu Gubernur untuk wilayah tingkat provinsi, sedangkan Bupati / walikota untuk wilayah tingkat Kabupaten / Kota. Beberapa variabel yang digunakan untuk menilai kelayakan UMR atau UMP di antaranya adalah pertumbuhan ekonomi daerah, tingkat inflasi, serta kebutuhan hidup minimum pekerja. Dalam Undang – undang No. 13 Tahun 2003 tersebut juga ditegaskan bahwa setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Upah minimum merupakan upah yang ditetapkan secara minimum Regional, Sektoral Regional, maupun Subsektoral. Dalam hal ini upah minimum adalah upah pokok dan tunjangan. Dari definisi di atas, maka terlihat dua unsur penting, yaitu upah permulaan adalah upah terendah yang harus diterima pekerja pada waktu pertama kali dia diterima bekerja, dan jumlah upah minimum haruslah dapat memenuhi kebutuhan hidup pekerja secara minimal yaitu kebutuhan untuk sandang, pangan, keperluan rumah tangga dan kebutuhan dasar lainnya (Sumarsono, 2009). Berikut model perhitungan tingkat upah yang harus dibayarkan ke karyawan :

$$W = WMPPL = MPPL \times P$$

Keterangan :

W : tingkat upah yang dibayar perusahaan kepada karyawan.

P : harga jual barang dalam rupiah per unit barang

WMPPL : *marginal physical product of labour* atau pertambahan hasil marginal pekerja, diukur dalam unit barang perunit waktu.

MPPL : *volume of marginal physical product of labour* atau nilai pertambahan hasil.

2.2.7 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia pada dasarnya mempunyai empat komponen utama yaitu produktifitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan. Melalui peningkatan empat komponen tersebut secara maksimal maka pembangunan manusia akan dapat berhasil dengan baik, yang dicirikan oleh peran manusia sebagai agen pembangunan yang efektif. Untuk mencapai hal itu maka penduduk suatu Negara atau daerah paling tidak harus memiliki peluang berumur panjang dan sehat, memiliki tingkat pendidikan yang memadai, serta peluang untuk merealisasikan pengetahuan yang dimiliki dalam kegiatan yang produktif sehingga memiliki pendapatan yang cukup dan memiliki daya beli serta kemauan untuk melakukan konsumsi bagi pemenuhan kebutuhannya. Indeks Pembangunan Manusia disusun berdasarkan tiga indikator, yaitu angka harapan hidup, angka melek huruf penduduk dewasa, rata – rata lama sekolah. Sedangkan BPS menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia merupakan ukuran capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM menggambarkan beberapa komponen yaitu sapaian umur yang panjang dan sehat yang mewakili bidang kesehatan, angka melek huruf, partisipasi sekolah, dan rata – rata lamanya bersekolah mengukur kinerja pembangunan bidang pendidikan dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata – rata besarnya pengeluaran per kapita (Feriyanto, 2014).

2.2.8 Angkatan Kerja

Angkatan kerja adalah bagian penduduk yang mampu dan bersedia melakukan pekerjaan. Arti dari mampu adalah mampu secara fisik dan jasmani,

kemampuan mental dan secara yuridis mampu serta tidak kehilangan kebebasan untuk memilih dan melakukan pekerjaan serta bersedia secara aktif maupun pasif melakukan dan mencari pekerjaan adalah termasuk dalam sebutan angkatan kerja. Tenaga kerja atau penduduk usia kerja 10 tahun ke atas mempunyai perilaku yang bermacam – macam. Dalam hubungannya dengan pasar kerja perilaku mereka dipisahkan menjadi 2 golongan, yaitu golongan yang aktif secara ekonomi dan bukan. Angkatan kerja termasuk golongan yang aktif secara ekonomi. Golongan ini terdiri dari penduduk yang menawarkan tenaga kerjanya dan berhasil memperolehnya dan penduduk yang menawarkan tenaga kerjanya di pasar tenaga kerja tetapi belum berhasil memperolehnya.

Ada 4 (empat) hal yang berkaitan dengan tenaga kerja :

1. Bekerja (*Employed*)

Adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit satu jam (tidak terputus) dalam satu minggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tidak dbayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.

2. Penacari kerja (*Unemployed*)

Penduduk yang menawarkan tenaga kerja tetapi belum berhasil memperoleh pekerjaan dianggap terus mencari pekerjaan. Oleh karena itu mereka yang tidak bekerja tidak dikelompokkan sebagai pengangguran tetapi lebih tepat sebagai pencari kerja.

3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (*Labor Force Participation Rate*)

Angka persentase yang menunjukkan besarnya tingkat partisipasi angkatan kerja dibandingkan penduduk usia kerja. Melihat angka TPAK akan tergambarkan bahwa tidak semua penduduk usia kerja menghasilkan barang dan jasa meskipun mereka dalam usia produktif

4. Profil Angkatan Kerja

Untuk memudahkan penawaran tenaga kerja biasanya di perlukan tolak ukur tertentu meliputi umur, jenis kelamin, wilayah kota, dan pendidikan

2.2.9 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Permendagri No. 13 Tahun 2006). Di dalam dokumen APBD terdapat penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya untuk mengatur jalannya perekonomian. Tujuan kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilisasikan harga, tingkat output maupun kesempatan kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi.

2.3 Hubungan Antara Variabel Independen dengan Variabel Dependen

2.3.1 Hubungan antara Inflasi dengan Penyerapan Tenaga Kerja

inflasi adalah proses kenaikan harga – harga barang secara terus menerus. Hubungan antara inflasi dengan penyerapan tenaga kerja berdasarkan sebabnya ialah *deman pull inflation* yaitu karena tarikan permintaan terjadi bagaimana perusahaan atau industri tidak mampu dengan cepat memenuhi kenaikan permintaan produk dari masyarakat (konsumen). Terjadinya kekurangan produk

akan menyebabkan kenaikan harga – harga produk di pasar, selanjutnya karena cost push imflation adanya dorongan kenaikan biaya produksi terjadi bagaimana perusahaan atau industri mengalami kenaikan harga faktor input produksi. Misalnya kenaikan harga bahan baku, kenaikan upah tenaga kerja, dan kenaikan BBM yang digunakan untuk produksi. Akibatnya dengan jumlah modal kerja yang sama akan dihasilkan unit produk yang lebih sedikit dengan harga yang lebih tinggi (Feriyanto, 2014).

2.3.2 Hubungan antara PDRB dengan Penyerapan Tenaga Kerja

PDRB merupakan total akumulasi dari berbagai sektor perekonomian yang diterbitkan oleh instansi – instansi seperti BPS. Dari data tersebut terlihatlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan ekonomi suatu daerah, yang dapat mengukur laju pembangunan ekonomi suatu daerah, hasil yang dapat dilihat adalah produksi barang – barang maupun jasa – jasa, orang – orang atau perusahaan yang ada di kota atau Negara tersebut. Pertumbuhan ekonomi memberikan peluang kesempatan kerja baru dan memberikan kesempatan baru dan memberikan kesempatan perusahaan untuk meningkatkan output yang berdampak pada peningkatan penggunaan faktor produksi, salah satunya penggunaan tenaga kerja, sehingga mengurangi jumlah pengangguran, atau akan terjadi penyerapan tenaga kerja (Mankwi, 2012).

2.3.3 Hubungan antara UMK dengan Penyerapan Tenaga Kerja

Upah Minimum Kabupaten ialah upah yang di tentukan oleh kepala daerah yaitu Gubernur untuk wilayah tingkat provinsi, sedangkan

Bupati/Walikota untuk wilayah tingkat Kabupaten/Kota. Beberapa variable yang digunakan untuk menilai kelayakan UMR atau UMP di antaranya adalah pertumbuhan ekonomi daerah, tingkat inflasi, serta kebutuhan hidup minimum pekerja (Feriyanto, 2014).

Suatu kurva permintaan terhadap pekerja menggambarkan, pada setiap tingkat upah berapa kuantitas pekerja yang maksimum yang akan dipekerjakan oleh majikan pada kurun waktu tertentu. Dan untuk masing –masing jumlah pekerja yang mungkin, terdapat sebuah tingkat upah maksimum bagi majikan untuk mau mempekerjakan pekerja pada jumlah tersebut (Sumarsono, 2009). Kurva permintaan tenaga kerja menggambarkan jumlah maksimum tenaga kerja yang suatu perusahaan bersedia untuk memperkerjakannya pada setiap kemungkinan tingkat upah dalam jangka waktu tertentu, pada permintaan tenaga kerja tingkat upah dilihat dari nilai produk marginal. Adanya pelaksanaan otonomi daerah dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor: 25 2000 tanggal 6 Mei 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi Sebagai daerah Otonomi, penetapan upah minimum dilakukan oleh pemerintah untuk menahan merosotnya tingkat upah, khususnya bagi pekerja / buruh tingkat bawah. Upah minimum merupakan jaring pengaman agar tingkat upah tidak lebih rendah jarring tersebut. Di pihak lain pemerintah memberikan kebebasan untuk mengatur upah yang berada diatas upah minimum. Hasil analisis sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa “besarnya penyediaan dan permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh upah. Apabila tingkat upah naik maka penawaran tenaga kerja akan meningkat. Sebaliknya jika tingkat upah meningkat maka permintaan

tenaga kerja akan menurun”.

Berdasarkan hasil penelitian Pangastuti (2015) menyebutkan bahwa upah memiliki pengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Artinya semakin tinggi tingkat upah maka akan semakin tinggi tingkat penyerapan tenaga kerja. Hal ini dikarenakan bahwa dalam suatu industri atau perusahaan besarnya upah yang diberikan untuk membayar tenaga kerja untuk industri atau perusahaan tidak selalu sama dengan besarnya upah minimum Kabupaten/Kota, bisa lebih tinggi ataupun lebih rendah, tergantung pada berbagai faktor diantaranya tingkat pendidikan dan kemampuan. Selain itu, adanya serikat pekerja yang bertujuan melindungi kesejahteraan pekerja/buruh juga berpengaruh terhadap peningkatan jumlah tenaga kerja yang terserap. Ketika terjadi kenaikan upah, perusahaan cenderung berkeinginan mengurangi tenaga kerja untuk menghemat biaya produksi. Namun, adanya serikat pekerja dengan berbagai kebijakan akan memperkecil peluang perusahaan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap buruh/karyawannya meskipun upah naik, bahkan pengusaha/majikan mengusahakan bagaimana ketika upah naik, jumlah tenaga kerja yang terserap tidak berkurang atau bahkan meningkat. Oleh karena itu, adanya serikat pekerja memberikan penjelasan hubungan positif antara upah dan penyerapan tenaga kerja

2.3.4 Hubungan antara IPM dengan Penyerapan Tenaga Kerja

BPS menyatakan Indeks Pembangunan Manusia merupakan ukuran capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM menggambarkan beberapa komponen, yaitu kesehatan, pendidikan dan

kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata – rata besarnya pengeluaran perkapita. Pembangunan manusia pada dasarnya mempunyai empat komponen utama yaitu pertama produktifitas dimana masyarakat harus dapat meningkatkan produktifitasnya dan berpartisipasi secara penuh dalam proses memperoleh penghasilan dan pekerjaan berupah. Kedua ekuitas, masyarakat harus punya akses untuk memperoleh kesempatan yang adil. Ketiga kesinambungan, akses untuk memperoleh kesempatan harus dipastikan tidak hanya untuk generasi sekarang tetapi untuk genegrasi selanjutnya. Keempat pemberdayaan, pembangunan harus dilakukan oleh masyarakat dan bukan hanya untuk mereka. Masyarakat harus berpastisipasi penuh dalam mengambil keputusan dan proses – proses yang mempengaruhi kehidupan mereka (Sukirno, 2004).

2.3.5 Hubungan antara APBD dengan Penyerapan Tenaga Kerja

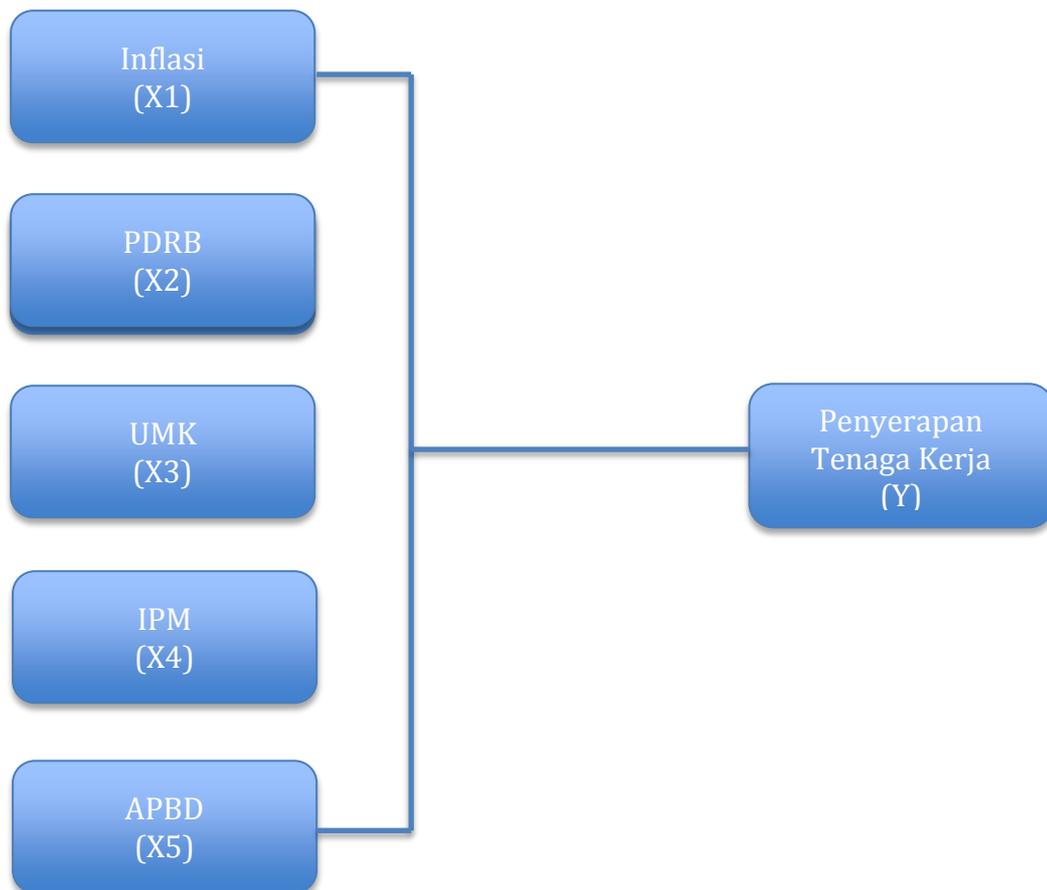
Subsidi merupakan salah satu pengeluaran pemerintah yang tidak hanya dikelurakan untuk masyarakat atau konsumen melainkan juga dikeluarkan pemerintah untuk membantu produsen melalui biaya produksi. Ketika subsidi biaya produksi dikeluarkan maka tingkat produksi juga meningkat. Dengan meningkatnya tingkat produksi maka produsen akan membutuhkan tenaga kerja lebih banyak lagi untuk mencapai produksi yang di targetkan. Sehingga dengan adanya pengeluaran pemerintah yang diterima produsen melalui subsidi menyebabkan penyerapan tenaga kerja juga semakin tinggi.

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut :

1. Diduga Inflasi berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah.
2. Diduga PDRB berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah.
3. Diduga UMK berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah.
4. Diduga IPM berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah.
5. Diduga APBD berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah.

Kerangka Berfikir : “Analisis Faktor – faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah”



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini menggunakan data yang bersifat kuantitatif. Data kuantitatif yaitu data yang berwujud dalam kumpulan angka – angka. Sedangkan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Sekunder yang bersumberkan pada laporan Badan Pusat Statistika (BPS Jawa Tengah) khususnya pada tahun 2010 – 2016. Jenis data yang digunakan adalah data panel yaitu gabungan data *time series* yaitu periode tahun 2010 – 2016 sedangkan data cross section adalah 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Data yang diteliti meliputi : (1) data Penyerapan Tenaga Kerja dapat dilihat dari tingkat partisipasi angkatan kerja yang di publikasikan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah (2) data Inflasi dapat dilihat dari tingkat inflasi yang di publikasikan oleh Badan Pusat Statistika (BPS) Provinsi Jawa Tengah (3) data PDRB dapat dilihat dari atas harga konstan (4) data Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dapat dilihat dari kebutuhan hidup layak dan upah minimum kabupaten Provinsi Jawa Tengah (5) data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat dilihat dari tingkat IPM yang di publikasikan oleh BPS Provinsi Jawa Tengah (6) data APBD yang dapat dilihat dari pengeluaran pemerintah di Provinsi Jawa Tengah.

3.2 Definisi Operasional Variabel

Dalam pebelitian ini Penyerapan Tenaga Kerja sebagai variabel terikat (dependen variabel), sedangkan pada variabel bebasnya (independen variabel)

adalah Inflasi, PDRB, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan APBD. Adapaun definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Penyerapan Tenaga Kerja merupakan jumlah tertentu dari tenaga kerja yang digunakan dalam suatu unit usaha tertentu atau dengan kata lain penyerapan tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang bekerja dalam suatu unit usaha. Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah tingkat partisipasi angkatan kerja di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010 – 2016 (Dalam Persen)
2. Inflasi adalah meningkatnya harga suatu barang atau jasa secara umum dan terus – menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor, antara lain : konsumis masyarakat yang meningkat secara berlebihan, likuiditas yang tinggi sehingga memicu konsumsi atau bahkan spekulasi. Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah inflasi di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010 – 2016 (Dalam Persen)
3. PDRB adalah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian suatu daerah. PDRB dapat mengukur laju pembangunan ekonomi suatu daerah, hasil yang dapat di lihat adalah produksi barang – barang maupun jasa – jasa, orang – orang atau perusahaan yang ada di perusahaan yang ada di Negara tersebut. Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah laju pertumbuhan PDRB (Dalam Persen)
4. Upah Minimum Kabupaten adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau dilakukan dan dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan atas

dasar suatu persetujuan atau peraturan perundang – undang serta dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan karyawan. Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah UMK tahun 2010 – 2016 Provinsi Jawa Tengah (Dalam Rupiah/Bulan)

5. Indeks Pembangunan Manusia adalah pengukuran perbandingan dari tingkat harapan hidup, melek huruf, pendidikan, dan standar hidup untuk suatu daerah atau Negara. Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah IPM Provinsi Jawa Tengah (Dalam Persen).
6. APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh DPRD. APBD ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan (Dalam Rupiah)

3.3 Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan analisis data panel (*pooled data*) sebagai alat pengolahan data serta dalam analisisnya menggunakan program *Eviews 9*. Data panel merupakan kombinasi antara data (*cross section*) dan (*time series*).

Persamaan Model :

$$\rightarrow Y = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \beta_5 X_{5it} + e_{it}$$

Y : Penyerapan Tenaga Kerja (persen)

X1 : Inflasi (persen)

X2 : PDRB (persen)

X3 : Upah Minimum Kabupaten (rupiah/bulan)

X4 : Indeks Pembangunan Manusia (persen)

X5 : APBD (rupiah)

i : banyaknya individu (35 Kabupaten Provinsi Jawa Tengah)

t : banyaknya waktu (periode 2010 – 2016)

3.4 Estimasi Regresi Data Panel

Dalam mengestimasi data panel ada tiga metode yang digunakan yaitu : pengujian hipotesis estimasi dalam penelitian ini meliputi pengujian secara *Common Effect*, *Fixed Effect*, dan *Random Effect* :

a. Common Effect Model atau Pooled Least Square (PLS)

Common Effect merupakan regresi yang paling mudah untuk dilakukan karena hanya menggabungkan data *time series* dan data *cross-section* kedalam data panel, dari data tersebut kemudian diregresi dengan metode *Ordinary Least Square* (OLS) atau teknik kuadrat terkecil untuk mengestimasi model data panel. Dalam regresi semacam ini maka hasilnya tidak dapat diketahui perbedaan baik antara individu maupun antara waktu disebabkan oleh pendekatan yang digunakan mengabaikan dimensi individu maupun waktu yang mungkin saja memiliki pengaruh.

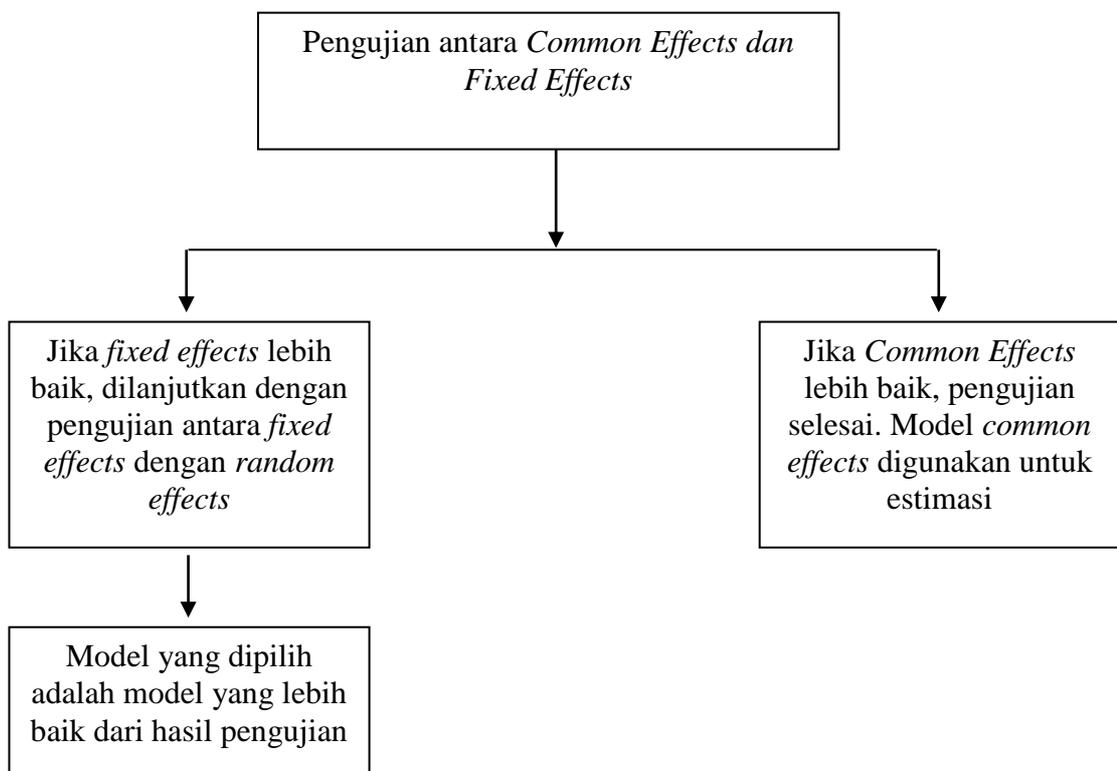
b. Fixed Effects Model (FEM)

Estimasi pada *fixed effects* menggunakan dua asumsi yang masing – masing menyatakan bahwa slope tetap dan intersep akan berbeda baik karena perbedaan individu maupun perbedaan waktu. Proses estimasi untuk kedua model *fixed effects* tersebut dilakukan dengan variabel *dummy* pada model ekonometri, yaitu variabel *dummy* untuk mengakomodasi perbedaan unit data dan perbedaan

periode waktu. Pendekatan pada estimasi ini disebut *Least Square Dummy Variabel* (LSDV).

c. Random Effects Model (REM)

Diasumsikan bahwa perbedaan intersep dan konstanta disebabkan oleh residual/error sebagai akibat perbedaan antar unit dan antar periode waktu yang terjadi secara random. Atas dasar itulah model *random effects* disebut juga dengan *error component model* (ECM). Ada satu syarat untuk menganalisis dengan efek random, yaitu objek data *cross section* harus lebih besar daripada banyaknya koefisien. Hal ini berkaitan dengan asumsi derajat kebebasan data yang dianalisis. Jika asumsi ini terlanggar maka koefisien efek random tidak dapat diestimasi, atau akan menghasilkan angka nol (Sriyana,2014).



Sumber : (Sriyana, 2014)

Gambar 3. 1 Prosedur Pengujian Pemilihan Model

3.5 Penentu Model Estimasi

Dalam mengestimasi regresi data panel terdapat tiga pendekatan yang dapat digunakan yaitu model *Common Effect Models* (CEM), *Fixed Effect Models* (FEM), dan *Random effect Models* (REM).

Pemilihan model yang digunakan dalam sebuah penelitian sangat perlu dilakukan berdasarkan pertimbangan statistic. Hal ini ditujukan untuk memperoleh dugaan yang efisien dan beberapa metode yang paling baik untuk digunakan adalah :

- a. *Chow Test* (uji F-statistik) untuk memilih model Common Effect (tanpa variabel dummy) atau dengan model Fixed Effect.
- b. *Hausman Test* untuk membandingkan antara model Fixed Effect atau Random Effect yang lebih baik untuk digunakan.
- c. *Uji Lagrange Multiplier* (LM) atau lengkapnya *The Breusch-Pagan LM Test*. Digunakan untuk memilih model *Common Effect* (tanpa variabel dummy) atau dengan model *Random Effect*.

3.6 Uji Statistik

Uji statistic yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Koefisien Regresi Determinasi (Uji R^2), Uji Koefisien Regresi secara bersama – sama (Uji F), dan Uji Koefisien Regresi Parsial (Uji t)

- a. Koefisien Regresi (R^2)

Untuk mengukur kebaikan kesesuaian garis regresi, yaitu menjelaskan proporsi atau persentase variasi total dalam variabel dependen Y yang dijelaskan oleh variabel independen X. Semakin besar nilai R^2 maka semakin besar variasi

variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen. Sebaliknya, semakin kecil R^2 berarti semakin kecil variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen. Semakin besar nilai R^2 menggambarkan semakin tepat garis regresi dalam menggambarkan nilai-nilai observasi. Hasil perhitungan *Adjusted R²* dapat dilihat pada output *Model Summary*. Pada kolom *Adjusted R²* dapat diketahui berapa persentase yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Sedangkan sisanya dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

b. Uji Koefisien Regresi Secara Bersama – sama (Uji F)

Uji F dilakukan untuk melihat apakah variabel-variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Dengan menggunakan tabel F-statistik diperoleh jika $F\text{-hitung} < F\text{-tabel}$ maka H_0 diterima dan jika $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$ maka H_0 ditolak.

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = \beta_5 = 0$, Berarti tidak ada pengaruh yang signifikan dan variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

$H_a : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq \beta_5 \neq 0$, berarti ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

c. Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk melihat apakah masing-masing variabel bebas secara parsial berpengaruh pada variabel terikatnya. Hipotesis uji t yaitu sebagai berikut:

1. Jika hipotesis signifikan positif
 - a. $H_0 : \beta_i = 0$

b. $H_1 : \beta_i > 0$

2. Jika hipotesis signifikan negatif

a. $H_0 : \beta_i = 0$

b. $H_1 : \beta_i < 0$

Menentukan tingkan signifikan (α) yaitu sebesar 5%

1. Kriteria pengujian

a. Jika nilai pengujian nilai prob. t-statistik $> \alpha$ maka, H_0 diterima artinya variabel bebas tidak akan mempengaruhi variabel terikat secara signifikan.

b. Jika nilai pengujian nilai prob. t-statistik $< \alpha$ maka, H_0 ditolak artinya variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

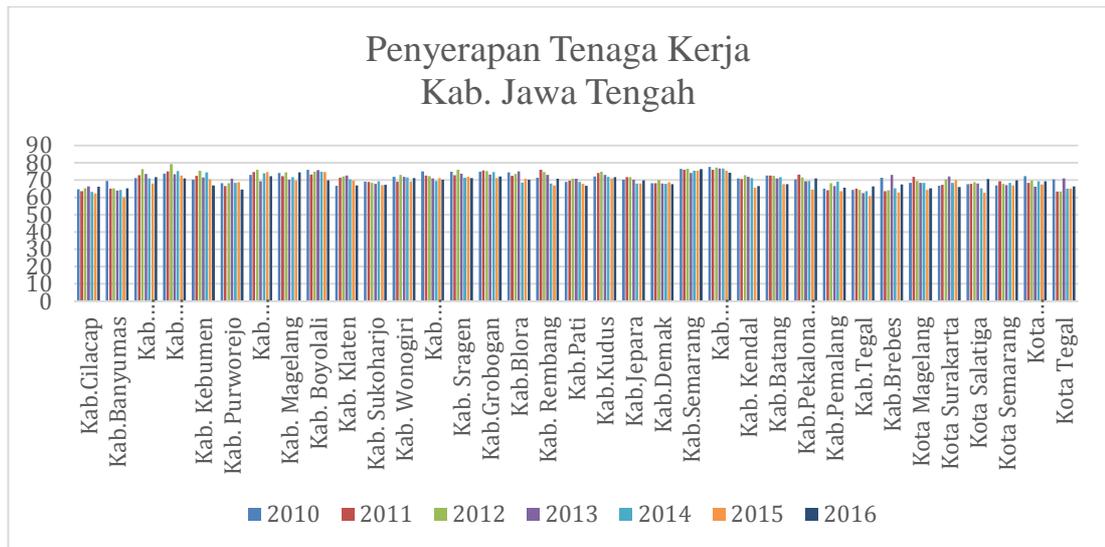
4.1 Deskripsi Data Penelitian

Dalam hal ini akan membahas mengenai hasil dari Inflasi, PDRB, UMK, IPM, APBD di Kabupaten Jawa Tengah tahun 2010 – 2016. Penelitian ini menggunakan metode data panel yaitu gabungan antara data time series dan data cross section. Jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 7 tahun. Variabel independent yang digunakan yaitu inflasi, PDRB, UMK, IPM, APBD. Variabel dependentnya adalah penyerapan tenaga kerja di 35 kabupaten Jawa Tengah. Alat bantu yang digunakan dalam mengolah dan menganalisis data dalam penelitian ini berupa software atau E-Views 9.

4.2 Diskripsi Objek Data Penelitian

a. Penyerapan Tenaga Kerja (Y)

Penyerapan tenaga kerja merupakan jumlah tenaga dalam suatu organisasi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga, baik internal maupun eksternal.



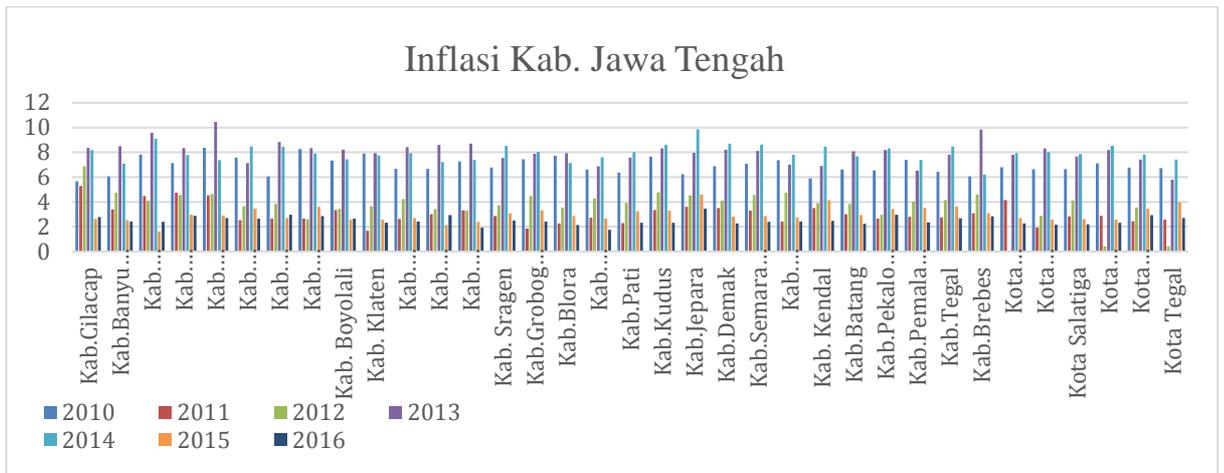
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah

Gambar 4. 1 Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 – 2016

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa tingkat penyerapan tenaga kerja di 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah mengalami fluktuasi dari 2010-2016. Kondisi ini disebabkan karena adanya ketimpangan antara upah minimum dengan kota di Jawa Tengah. Penyerapan tertinggi terjadi di Kabupaten Temanggung pada tahun 2010 sebesar 77,57 persen.

b. Inflasi

Inflasi adalah kenaikan harga barang yang secara terus menerus.



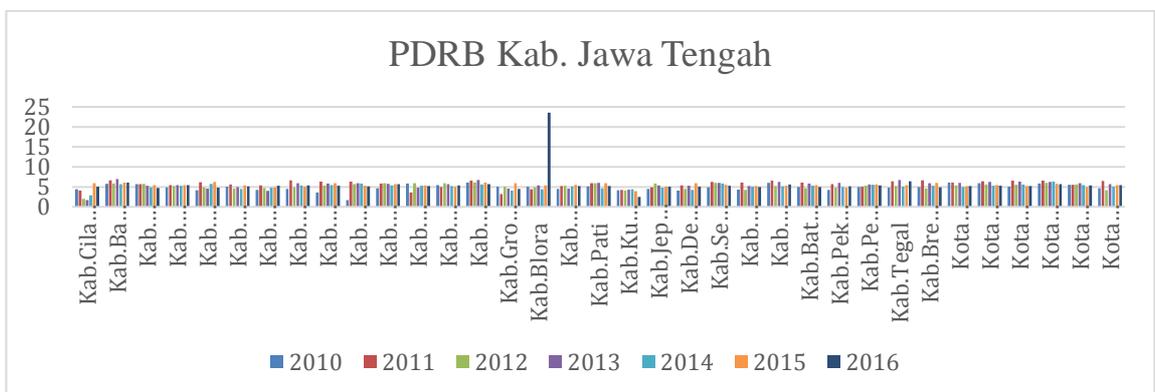
Sumber Data : BPS Provinsi Jawa Tengah

Gambar 4. 2 Jumlah Inflasi di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 - 2016

Berdasarkan dari gambar diatas menunjukkan bahwa tingkat inflasi di 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah mengalami fluktuasi dari 2010-2016. Kondisi tersebut disebabkan karena adanya . Inflasi tertinggi pada tahun 2013 di Kabupaten Kebumen.

c. PDRB

PDRB merupakan jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian suatu daerah.



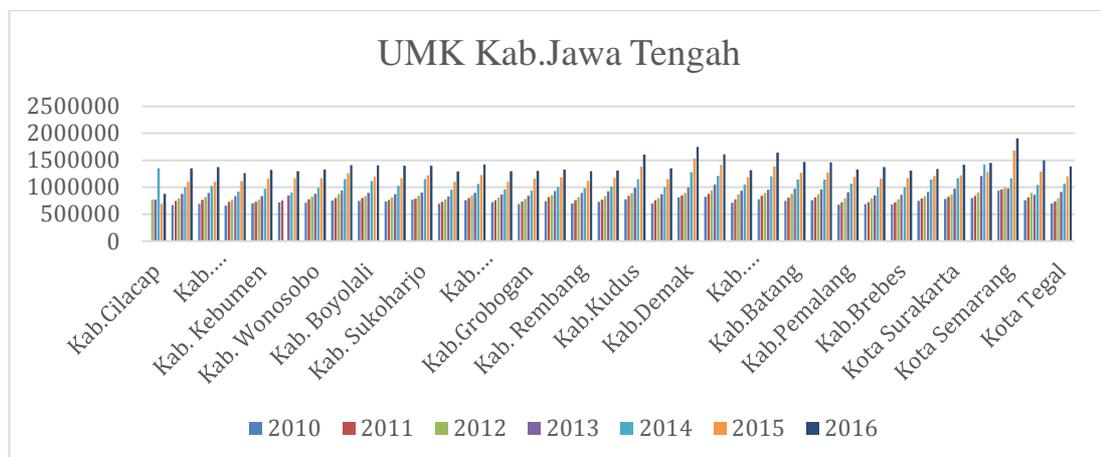
Sumber Data : BPS Provinsi Jawa Tengah

Gambar 4. 3 Jumlah PDRB di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 – 2016

Berdasarkan dari gambar 4.3 menunjukkan bahwa tingkat PDRB di 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah mengalami fluktuasi dari 2010-2016. Kondisi tersebut disebabkan karena adanya . PDRB tertinggi di Kabupaten Blora pada tahun 2016.

d. UMK (Upah Minimum Kabupaten)

UMK adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau dilakukan dan dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan atas dasar suatu persetujuan atau peraturan perundang – undang serta dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan karyawan termasuk tunjangan, baik untuk karyawan itu sendiri maupun untuk keluarga.

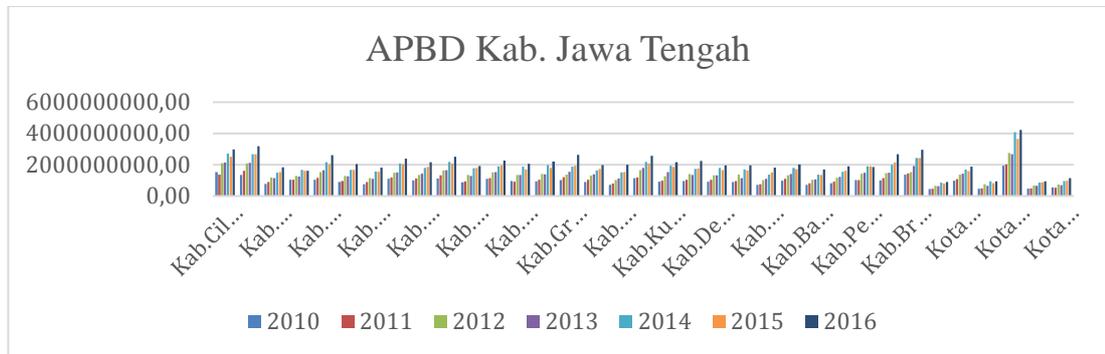


Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah

Gambar 4. 4 Jumlah UMK di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 – 2016

Berdasarkan dari gambar diatas menunjukkan bahwa tingkat UMK di 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah mengalami fluktuasi dari 2010-2016. Kondisi tersebut disebabkan karena adanya . Upah minimum kota tertinggi pada tahun 2016 di Kota Semarang.

e. APBD



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah

Gambar 4. 5 Jumlah Pengeluaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 - 2016

Berdasarkan dari gambar diatas menunjukkan bahwa tingkat PP di 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah mengalami fluktuasi dari 2010-2016. Kondisi tersebut disebabkan karena adanya . Peraturan Pemerintah paling tinggi berada di Kota Semarang pada tahun 2016.

4.3 Analisis Data

Model regresi data panel digunakan untuk mengetahui model mana yang paling efisien dari tiga model persamaan, yaitu *Common Effect Model (CEM)*, *Fixed Effect model (FEM)* dan *Random Effect Model (REM)* perlu diuji dengan menggunakan model regresi data panel. Berikut dijabarkan hasil untuk masing-masing model regresi data panel. Model regresi panel I digunakan untuk menguji model regresi dengan data panel untuk mengetahui pengaruh variabel Inflasi, PDRB, UMK, IPM, Pengeluaran Pemerintah terhadap variabel Penyerapan Tenaga Kerja.

a. Common Effect Model (CEM)

Model *common effect* merupakan pendekatan paling sederhana yang disebut estimasi CEM atau *pooled least square*. Model ini tidak memperhatikan dimensi individu maupun waktu sehingga diasumsikan bahwa perilaku antar individu sama dalam berbagai kurun waktu. Model ini hanya mengkombinasikan data *time series* dan *cross section* dalam bentuk *pool*. Hasil perhitungan menggunakan data eviews 9 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 1

Hasil Regresi Data Panel Common Effect Model

Variabel	Probabilitas
Inflasi	0,8189
PDRB	0,3783
UMK	0,6494
IPM	0,0758
Pengeluaran Pemerintah	0,0119
R-squared	0,080314
Adjusted R-squared	0,060746

b. Fixed Effect model (FEM)

Model *Fixed effects* mengasumsikan bahwa terdapat efek yang berbeda antar individu. Perbedaan itu dapat diakomodasi melalui perbedaan pada *intersepnya*. Oleh karena itu, dalam model *fixed effects*, setiap individu merupakan parameter yang tidak diketahui dan akan diestimasi dengan menggunakan teknik variabel *dummy*. Hasil perhitungan menggunakan data eviews 9 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 2

Hasil Regresi Data Panel Model Fixed Effect Model

Variabel	Probabilitas
Inflasi	0,4831
PDRB	0,0307
UMK	0,0004
IPM	0,4304
Pengeluaran Pemerintah	0,0208
R-squared	0,805343
Adjusted R-squared	0,759188

c. *Random Effect model (REM)*

Model *random effects model (REM)* berbeda dengan *fixed effects model*. Model ini menjelaskan efek spesifik dari masing - masing individu diperlakukan sebagai bagian dari komponen *error* yang bersifat acak dan tidak berkorelasi dengan variabel penjelas yang teramati. Hasil perhitungan menggunakan data eviews 9 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 3

Hasil Regresi Data Panel Model Random Effect Model

Variabel	Probabilitas
Inflasi	0,2904
PDRB	0,1639
UMK	0,0141
IPM	0,1645
Pengeluaran Pemerintah	0,6761
R-squared	0,145748
Adjusted R-squared	0,127572

4.3.1 Pemilihan Model (Teknik Estimasi)

Untuk mengetahui model mana yang paling efisien dari *Common Effect Model (CEM)*, *Fixed Effect model (FEM)* dan *Random Effect Model (REM)* perlu

diuji masing-masing model tersebut. Metode yang digunakan untuk menguji ketiga model ini adalah sebagai berikut:

a. Uji Chow (Common Effect Model vs Fixed Effect)

Uji Chow digunakan untuk memilih pendekatan terbaik antara model pendekatan terbaik antara model pendekatan *Common Effect Model (CEM)* dan *Fixed Effect model (FEM)*. Adapun uji hipotesisnya adalah sebagai berikut:

H₀ : *Common Effect Model (CEM)*

H_a : *Fixed Effect model (FEM)*

Dengan asumsi sebagai berikut:

1. H₀ diterima jika, $p\text{-value} > 0,05$
2. H_a diterima jika, $p\text{-value} < 0,05$

Tabel 4. 4

Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: FIXED			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	18,945377	(35,194)	0.0000
Cross-section Chi-square	58,049526	35	0.0000

Sumber: data diolah, 2018

Dari tabel diatas dapat diketahui nilai $p\text{-value}$ adalah 0,000. Nilai ini lebih kecil dari α ($0.000 < 0.05$), jadi dapat dikatakan bahwa H_a diterima yang artinya model *fixed effects (FEM)* lebih tepat untuk digunakan model estimasi persamaan regresi.

b. Uji Hausman (Random Effect Model vs Fixed Effect)

Uji hausman digunakan untuk memilih pendekatan terbaik antara model pendekatan terbaik antara model pendekatan *Random Effect Model (REM)* dan *Fixed Effect model (FEM)*. Adapun uji hipotesisnya adalah sebagai berikut:

H0 : *Random Effect Model (REM)*

Ha : *Fixed Effect model (FEM)*

Dengan asumsi sebagai berikut:

1. H0 diterima jika, $p\text{-value} > 0,05$
2. Ha diterima jika, $p\text{-value} < 0,05$

Tabel 4. 5

Hasil Uji Model Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Equation: FIXED			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	11,499594	5	0.0423

Sumber: data diolah, 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui nilai $p\text{-value}$ adalah 0.0423. Nilai ini lebih kecil; dari α ($0.1255 < 0.05$), jadi dapat dikatakan bahwa Ha diterima yang artinya model *Fixed Effect model (FEM)* lebih tepat untuk digunakan model estimasi persamaan regresi.

c. Uji Lagrange Multiplier (Common Effect Model vs Random Effect)

Uji Lagrange Multiplier ini bertujuan untuk membandingkan antara model *Common Effect* dan model *Random Effect*. Hasil dari pengujian dengan

menggunakan uji ini adalah mengetahui metode mana yang sebaiknya dipilih dengan hipotesis sebagai berikut:

H_0 : *Common Effect Model (CEM)*

H_a : *Random Effect model (REM)*

Dengan asumsi sebagai berikut:

1. H_0 diterima jika, $p\text{-value} > 0,05$
2. H_a diterima jika, $p\text{-value} < 0,05$

Tabel 4. 6

Hasil Uji Model Lagrange Multiplier

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Equation: FIXED			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	319,7706 (0,0000)	0,889120 (0,0000)	320,6597 (0,0000)

Sumber: data diolah, 2018

Berdasarkan tabel diatas maka, diketahui nilai $p\text{-value}$ adalah 0,000. Nilai ini lebih besar dari α ($0.000 < 0.05$), jadi dapat dikatakan bahwa H_a diterima yang artinya model *Random Effect model (REM)* lebih tepat untuk digunakan model estimasi persamaan regresi.

d. Pemilihan Model Akhir

Berdasarkan uji Chow, uji Hausman dan uji Lagrange Multiplier maka pada penulis memilih model *Fixed Effect Model (FEM)* yang digunakan dalam

penelitian. Berikut disajikan hasil ringkasan perbandingan metode *common effect*, *fixed effect* dan *random effect* sebagai berikut:

Tabel 4. 7 Hasil Ringkasan Perbandingan Metode Common Effect, Fixed Effect Dan Random Effect

Model	Common Effect	Fixed Effect	Random Effect
R-Squared	0.080314	0.805343	0.145748
Adjusted R-Squared	0.060746	0.759188	0.127572
Prob (F-Statistic)	0.001363	0,000000	0.000001

Sumber: data diolah, 2018

Berdasarkan tabel diatas diperoleh hasil bahwa model *fixed effect* memiliki koefisien determasi terbesar dibandingkan dengan model *common effect* dan *random effect*. dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan hasil uji kelayakan model dan nilai koefisien determinasi, maka model *fixed effect* adalah model yang paling cocok untuk memprediksi pengaruh variabel INFL, PDRB, UMK, IPM, PP terhadap variabel PTK.

Tabel 4. 8

Konstanta Antar Daerah

NO	Kabupaten / Kota	Effect	C	Konstanta
1	Kab. Banjarnegara	-7.1291	26.4232	19.2941
2	Kab. Blora	1.0361	26.4232	27.4593
3	Kab. Boyolali	4.36427	26.4232	30.7875
4	Kab. Brebes	-5.8601	26.4232	20.5631
5	Kab. Batang	-0.5169	26.4232	25.9063
6	Kab. Demak	-2.8819	26.4232	23.5414
7	Kab. Grobogan	3.67498	26.4232	30.0982
8	Kab. Jepara	0.29628	26.4232	26.7195
9	Kab. Karanganyar	2.66109	26.4232	29.0843
10	Kab. Kebumen	0.66033	26.4232	27.0836
11	Kab. Kendal	0.84842	26.4232	27.2717

NO	Kabupaten / Kota	Effect	C	Konstanta
12	Kab. Klaten	-1.3153	26.4232	25.108
13	Kab. Kudus	2.64053	26.4232	29.0638
14	Kab. Magelang	0.69983	26.4232	27.1231
15	Kab. Pati	-1.9304	26.4232	24.4928
16	Kab. Pekalongan	-1.0039	26.4232	25.4193
17	Kab. Pemasaran	-5.898	26.4232	20.5252
18	Kab. Purbalingga	1.85838	26.4232	28.2816
19	Kab. Purworejo	1.78349	26.4232	28.2067
20	Kab. Rembang	5.22627	26.4232	31.6495
21	Kab. Semarang	3.46374	26.4232	29.887
22	Kab. Sragen	-0.6726	26.4232	25.7506
23	Kab. Sukoharjo	-7.7648	26.4232	18.6585
24	Kab. Tegal	5.96622	26.4232	32.3894
25	Kab. Temanggung	1.8055	26.4232	28.2287
26	Kab. Wonogiri	0.68536	26.4232	27.1086
27	Kab. Wonosobo	2.94484	26.4232	29.3681
28	Kab. Banyumas	3.57086	26.4232	29.9941
29	Kab. Cilacap	-5.9138	26.4232	20.5094
30	Kota Magelang	1.00997	26.4232	27.4332
31	Kota Pekalongan	0.65792	26.4232	27.0811
32	Kota Salatiga	0.21684	26.4232	26.6401
33	Kota Semarang	-4.0972	26.4232	22.3261
34	Kota Surakarta	0.90458	26.4232	27.3278
35	Kota Tegal	-1.42055	26.4232	25.0027

Sumber : Olahan Data *Eviews 9*

Pada Tabel 4.13 menunjukkan konstanta masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jawa tengah tahun 2010-2016. Melalui tabel tersebut dapat dipilih bahwa Kabupaten Sukoharjo dengan tingkat Penyerapan Tenaga Kerja terendah sebesar 18.6585%, kemudian untuk kabupaten/kota yang memiliki tingkat Penyerapan Tenaga Kerja yang paling tinggi adalah Kabupaten Tegal sebesar 32.3894%.

Tabel 4. 9

Konstanta Pertahun (Fixed Effect period)

2010	3.620239	26.42323	30.04347
2011	2.762567	26.42323	29.1858
2012	3.048014	26.42323	29.47124
2013	1.198143	26.42323	27.62137
2014	-1.564	26.42323	24.85923
2015	-4.23406	26.42323	22.18917
2016	-4.8309	26.42323	21.59233

Sumber : Olahan Data *Eviews 9*

Tabel 4.14 Tabel Konstanta (Fixed Effect Period) dalam Penyerapan Tenaga Kerja di kabupaten/kota di Provinsi Jawa tengah tahun 2010-2016 dapat dilihat dengan konstanta pertahun diketahui bahwa perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja yang memiliki nilai tinggi yaitu pada tahun 2010 dengan konstanta 30.04347 dan kemudian untuk Penyerapan Tenaga Kerja yang paling rendah pada tahun 2016 dengan konstanta 21.59233.

4.4 Uji Statistik

a. Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)

Tabel 4.10

Hasil Uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	26.42323	107.0821	0.246757	0.8054
INFLASI?	0.028602	0.040701	0.702728	0.4831
PDRB?	2.109431	0.969085	2.176725	0.0307
UMK?	8.840393	2.452422	3.604761	0.0004
IPM?	-19.42104	24.57931	-0.790138	0.4304
PP?	1.90E-09	8.14E-10	2.329965	0.0208

Sumber : Olahan Data, 2018

Seperti yang ditampilkan pada tabel 4.10 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pengujian terhadap Koefisien Angka Inflasi

Koefisien variabel Angka Inflasi adalah 0,028602 dan t-statistik sebesar 0,702728 sedangkan nilai probabilitasnya sebesar 0,4831, dimana menunjukkan angka nilai probabilitasnya lebih dari α yaitu pada tingkatan 5 persen atau 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa gagal menolak H_0 dan menerima H_0 sehingga secara statistik menunjukkan bahwa variabel angka Inflasi tidak berpengaruh terhadap variabel penyerapan tenaga kerja.

2. Pengujian terhadap Koefisien PDRB

Koefisien variabel PDRB adalah 2.109431 dan t-statistik sebesar 2.176725 sedangkan nilai probabilitasnya sebesar 0,0307, dimana kurang dari α yaitu pada tingkatan 5% atau 0,05. Hal ini menunjukkan menolak H_0 dan menerima H_a sehingga secara statistik menunjukkan bahwa variabel PDRB berpengaruh terhadap variabel penyerapan tenaga kerja.

3. Pengujian terhadap Koefisien UMK

Koefisien variabel UMK adalah 8,840393 dan t-statistik sebesar 3,604761 sedangkan nilai probabilitasnya sebesar 0,0004, dimana kurang dari α yaitu pada tingkatan 5% atau 0,05. Hal ini menunjukkan menolak H_0 dan menerima H_a sehingga secara statistik menunjukkan bahwa variabel UMK berpengaruh terhadap variabel penyerapan tenaga kerja

4. Pengujian terhadap Koefisien Angka IPM

Koefisien variabel Angka IPM adalah -19,42104 dan t-statistik sebesar -0,790138 sedangkan nilai probabilitasnya sebesar 0,4304, dimana menunjukkan angka nilai probabilitasnya lebih dari α yaitu pada tingkatan 5 persen atau 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa gagal menolak H_0 dan menerima H_0 sehingga secara statistik menunjukkan bahwa variabel angka IPM tidak berpengaruh terhadap variabel penyerapan tenaga kerja.

5. Pengujian terhadap Koefisien Pengeluaran Pemerintah (APBD)

Koefisien variabel PP adalah 1,90E-09 dan t-statistik sebesar 2,329965 sedangkan nilai probabilitasnya sebesar 0,0208, dimana kurang dari α yaitu pada tingkatan 5% atau 0,05. Hal ini menunjukkan menolak H_0 dan menerima H_a sehingga secara statistik menunjukkan bahwa variabel PP berpengaruh terhadap variabel penyerapan tenaga kerja.

b. Koefisien Regresi Secara Bersama – Sama (Uji Signifikan F)

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara keseluruhan mempengaruhi variabel dependen atau tidak. F-hitung dalam perhitungan menggunakan program *Eviews 9.0* sebesar 17,44842 dengan nilai probabilitasnya sebesar 0,0000, dimana kurang dari α pada tingkatan 5 persen atau 0,05. Hal ini secara estimasi *Fixed Effect*, variabel-variabel independen yang terdiri dari angka Inflasi (X_1), PDRB (X_2), UMK (X_3), dan IPM (X_4) APBD(X_5) secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen yaitu penyerapan tenaga kerja (Y).

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) mengukur seberapa besar variasi variabel dependen dijelaskan oleh variabel independen. Dalam penelitian ini variabel dependen yaitu penyerapan tenaga kerja (Y) dan variabel independen terdiri dari angka Inflasi (X_1), PDRB (X_2), UMK (X_3), IPM (X_4), dan APBD (X_5) Pada model estimasi *Fixed Effect*, R^2 sebesar 0,80343 sehingga variasi variabel penyerapan tenaga kerja dapat dijelaskan oleh variabel angka Inflasi, PDRB, UMK, IPM, dan Pengeluaran Pemerintah sebesar 80,53 persen serta sisanya 19,47 persen dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

4.5 Interpretasi Hasil

1. Koefisien Konstanta sebesar 26,42323, artinya jika variabel angka inflasi, PDRB, UMK, IPM, PP sebesar nol, maka penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah 26,42323 persen.
2. Koefisien Inflasi pemerintah sebesar 0,028602, maka Inflasi berpengaruh positif. Artinya ketika Inflasi naik 1 persen maka penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Jawa Tengah naik sebesar 0,028602 persen, dengan asumsi variabel lain tetap.
3. Koefisien PDRB sebesar 2,109431, maka PDRB berpengaruh positif. Artinya ketika PDRB naik 1 persen maka penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Jawa Tengah naik sebesar 2,109431 persen, dengan asumsi variabel lain tetap.
4. Koefisien UMK sebesar 8,840393 maka UMK berpengaruh positif. Artinya ketika UMK naik 1 persen maka penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Jawa Tengah naik sebesar 8,840393 persen, dengan asumsi variabel lain tetap.

5. Koefisien IPM sebesar -19,42104 maka IPM berpengaruh negatif. Artinya ketika IPM naik 1 persen maka penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Jawa Tengah turun sebesar 19,42104 persen, dengan asumsi variabel lain tetap.
6. Koefisien Pengeluaran Pemerintah sebesar 1,90E-09 maka PP berpengaruh positif. Artinya ketika PP naik 1 persen maka penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Jawa Tengah naik sebesar 1,90E-09 persen, dengan asumsi variabel lain tetap.

4.6 Pembahasan

1. Analisis Pengaruh Inflasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Dari hasil penelitian tersebut inflasi sesuai dengan hipotesis dan berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Bila dikaitkan dengan penyerapan tenaga kerja inflasi yang meningkat kenaikan harga – harga barang secara terus menerus. Hubungan antara inflasi dengan penyerapan tenaga kerja berdasarkan sebabnya ialah *deman pull inflation* yaitu karena tarikan permintaan terjadi bagaimana perusahaan atau industri tidak mampu dengan cepat memenuhi kenaikan permintaan produk dari masyarakat (konsumen). Terjadinya kekurangan produk akan menyebabkan kenaikan harga – harga produk di pasar, selanjutnya karena *cost push imflation* adanya dorongan kenaikan biaya produksi terjadi bagaimana perusahaan atau industri mengalami kenaikan harga faktor input produksi (Feriyanto, 2014).

2. Analisis Pengaruh PDRB Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Dari hasil penelitian tersebut PDRB sesuai dengan hipotesis dan berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.

Bila dikaitkan dengan penyerapan tenaga kerja pertumbuhan penduduk dapat mengukur nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian suatu daerah, yang dapat mengukur laju pembangunan ekonomi suatu daerah, hasil yang dapat dilihat adalah produksi barang – barang maupun jasa – jasa, orang – orang atau perusahaan yang ada di kota atau Negara tersebut. Pertumbuhan ekonomi memberikan peluang kesempatan kerja baru dan memberikan kesempatan baru dan memberikan kesempatan perusahaan untuk meningkatkan output yang berdampak pada peningkatan penggunaan faktor produksi, salah satunya penggunaan tenaga kerja, sehingga mengurangi jumlah pengangguran, atau akan terjadi penyerapan tenaga kerja (Mankwi, 2012).

3. Analisis Pengaruh UMK Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Dari hasil penelitian tersebut UMK sesuai dengan hipotesis dan berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.

upah menggambarkan berapa kuantitas pekerja yang maksimum yang akan dipekerjakan oleh perusahaan pada kurun waktu tertentu. Dan untuk masing – masing jumlah pekerja yang mungkin, terdapat sebuah tingkat upah maksimum bagi perusahaan untuk mau mempekerjakan pekerja pada jumlah tersebut. Hasil penelitian ini sejalan dengan Pangastuti (2015) bahwa dalam

suatu industri atau perusahaan besarnya upah yang diberikan untuk membayar tenaga kerja untuk industri atau perusahaan tidak selalu sama dengan besarnya upah minimum Kabupaten/Kota, bisa lebih tinggi ataupun lebih rendah, tergantung pada berbagai faktor diantaranya tingkat pendidikan dan kemampuan. Selain itu, adanya serikat pekerja yang bertujuan melindungi kesejahteraan pekerja/buruh juga berpengaruh terhadap peningkatan jumlah tenaga kerja yang terserap. Ketika terjadi kenaikan upah, perusahaan cenderung berkeinginan mengurangi tenaga kerja untuk menghemat biaya produksi. Namun, adanya serikat pekerja dengan berbagai kebijakan akan memperkecil peluang perusahaan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap buruh/karyawannya meskipun upah naik, bahkan pengusaha/majikan mengusahakan bagaimana ketika upah naik, jumlah tenaga kerja yang terserap tidak berkurang atau bahkan meningkat. Oleh karena itu, adanya serikat pekerja memberikan penjelasan hubungan positif antara upah dan penyerapan tenaga kerja.

Analisis Pengaruh IPM Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Dari hasil penelitian tersebut IPM tidak sesuai dengan hipotesis dan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.

Bila dikaitkan dengan penyerapan tenaga kerja seharusnya Pembangunan manusia dapat menggambarkan empat komponen utama yaitu pertama produktifitas dimana masyarakat harus dapat meningkatkan produktifitasnya dan berpartisipasi secara penuh dalam proses memperoleh penghasilan dan

pekerjaan berubah. Kedua ekuitas, masyarakat harus punya akses untuk memperoleh kesempatan yang adil. Ketiga kesinambungan, akses untuk memperoleh kesempatan harus dipastikan tidak hanya untuk generasi sekarang tetapi untuk generasi selanjutnya. Keempat pemberdayaan, pembangunan harus dilakukan oleh masyarakat dan bukan hanya untuk mereka (Feriyanto, 2014).

4. Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Dari hasil penelitian tersebut PP sesuai dengan hipotesis dan berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.

Ketika subsidi biaya produksi dikeluarkan maka tingkat produksi juga meningkat. Dengan meningkatnya tingkat produksi maka produsen akan membutuhkan tenaga kerja lebih banyak lagi untuk mencapai produksi yang di targetkan. Sehingga dengan adanya pengeluaran pemerintah yang diterima produsen melalui subsidi menyebabkan penyerapan tenaga kerja juga semakin tinggi (Sukirno, 2004).

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan alat analisis diperoleh beberapa hasil penelitian dan pembahasan. Uraian hasil penelitian dan pembahasan tertuang dalam simpulan serta implikasi. Berikut kesimpulan dari penelitian mengenai pertumbuhan ekonomi dan disparitas pendapatan sebagai berikut:

1. Angka Inflasi yang digambarkan oleh data Inflasi dalam persen pada masing-masing kabuapten di Provinsi Jawa Tengah memiliki hubungan negatif terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja.
2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang digambarkan oleh data PDRB dalam persen masing-masing kabupaten di Provinsi Jawa Tengah memiliki hubungan positif terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja.
3. Upah Minimum Kabupaten yang digambarkan oleh data UMK dalam rupiah pada masing-masing kabupaten di Jawa Tengah memiliki pengaruh yang memiliki hubungan yang positif terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja.
4. IPM yang digambarkan oleh data IPM dalam persen pada masing-masing kabupaten di Jawa Tengah memiliki hubungan yang negatif terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja
5. Pengeluaran Pemerintah (APBD) yang digambarkan dalam data PP dalam rupiah pada masing-masing kabupaten di Jawa Tengah memiliki pengaruh

yang memiliki hubungan yang positif terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja.

5.2 Implikasi

1. Pemerintah daerah sebaiknya dapat mengendalikan tingkat inflasi, karena semakin rendah tingkat inflasi suatu daerah maka penyerapan tenaga kerja tidak berkurang.
2. Pemerintah diharapkan mampu meningkatkan produktivitas masyarakat daerah karena bila produktivitas meningkat penyerapan tenaga kerja akan meningkat.
3. Pemerintah diharapkan selalu memperhatikan tingkat kenaikan UMK dikabupatennya, karena UMK berpengaruh terhadap kebutuhan hidup layak tenaga kerja.
4. Pemerintah diharapkan meningkatkan IPM suatu daerahnya karena bila IPM meningkat maka penyerapan tenaga kerja akan lebih baik dan kualitas dari tenaga kerja tersebut akan baik
5. Pemerintah harus meningkatkan pembiayaan proyek proyek pemerintah agar menambah lapangan kerja yang menyerap tenaga kerja yang tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Biamrillah, A., & Nurhayati, S. (2018). "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Di Daerah Karasidenan Semarang" . *Ekonomi Jurnal*, 1-16.
- Badan Pusat Statistika. (2010). *Provinsi DI Jawa Tengah Dalam Angka 2010-2016*. Jawa Tengah: Badan Pusat Statistik Provibsi Jawa Tengah.
- Chusna, Arifatul.(2013). "Pengaruh Laju Pertumbuhan Sektor Industri, Investasi, dan Upah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1980-2011". *Skripsi*. Semarang. Fakultas Ekonomi UNNES
- Depnakertrans. (2004, Februari 14). *Penyerapan Tenaga Kerja*. Retrieved from Dinas Ketenaga Kerjaan Jawa Tengah: <http://disnakertrans.jatengprov.go.id/>
- Fadhilah, Nur Dian.(2012). Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Kecil (Studi Kasus di Sentra). *Ekonomi Jurnal*, 1-19
- Feriyanto, N. (2014). *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Kusuma, B. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Permintaan Tenaga Kerja di Indonesia. *Ekonomi Jurnal*, 1-86.
- Mankwi, N. (2012). *Makroekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Pangastuti, Y. (2015). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Di Jawa Tengah. *Ekonomi Jurnal*, 1-9.
- Putri, S. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten atau Kota di DIY . *Ekonomi Jurnal*, 1-69.
- Sobita, N., & Suparta, I. (2014). Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Lampung. *Ekonomi Jurnal*, 1-26.

- Sriyana, J. (2014). *Metode Regresi Data Panel*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Sukirno, S. (2004). *Pengantar Teori MAkro Ekonomi Edisi Ketiga*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sumarsono, S. (2009). *Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jember: Graha Ilmu.
- Woyanti, Nenek. (2009). “Analisis pengaruh faktor ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja pada industri kecil tempe di Kota Semarang”. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
- Zamrowi, M. Taufik, (2007). “Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Kecil”. *Skripsi*. Universitas Diponegoro Semarang.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Regresi Data Panel *Common Effect Model*

Dependent Variable: PENYERAPAN?
 Method: Pooled Least Squares
 Date: 04/10/18 Time: 06:20
 Sample: 2010 2016
 Included observations: 7
 Cross-sections included: 36
 Total pool (unbalanced) observations: 241

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	109.0468	18.55676	5.876389	0.0000
INFLASI?	0.017355	0.075728	0.229171	0.8189
PDRB?	1.367306	1.548864	0.882780	0.3783
UMK?	-0.640075	1.406188	-0.455185	0.6494
IPM?	-6.841393	3.835416	-1.783742	0.0758
PP?	-1.23E-09	4.85E-10	-2.534124	0.0119
R-squared	0.080314	Mean dependent var		70.25456
Adjusted R-squared	0.060746	S.D. dependent var		3.735408
S.E. of regression	3.620175	Akaike info criterion		5.435503
Sum squared resid	3079.832	Schwarz criterion		5.522261
Log likelihood	-648.9781	Hannan-Quinn criter.		5.470456
F-statistic	4.104402	Durbin-Watson stat		0.659269
Prob(F-statistic)	0.001363			

Lampiran 2. Hasil Regresi Data Panel Model Fixed Effect Model

Dependent Variable: PENYERAPAN?
 Method: Pooled Least Squares
 Date: 04/10/18 Time: 06:20
 Sample: 2010 2016
 Included observations: 7
 Cross-sections included: 36
 Total pool (unbalanced) observations: 241

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	26.42323	107.0821	0.246757	0.8054
INFLASI?	0.028602	0.040701	0.702728	0.4831
PDRB?	2.109431	0.969085	2.176725	0.0307
UMK?	8.840393	2.452422	3.604761	0.0004
IPM?	-19.42104	24.57931	-0.790138	0.4304
PP?	1.90E-09	8.14E-10	2.329965	0.0208

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)
 Period fixed (dummy variables)

R-squared	0.805343	Mean dependent var	70.25456
Adjusted R-squared	0.759188	S.D. dependent var	3.735408
S.E. of regression	1.833063	Akaike info criterion	4.222956
Sum squared resid	651.8631	Schwarz criterion	4.902564
Log likelihood	-461.8662	Hannan-Quinn criter.	4.496758
F-statistic	17.44842	Durbin-Watson stat	2.287751
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 3. Hasil Regresi Data Panel Model *Random Effect Model*

Dependent Variable: PENYERAPAN?
 Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 04/10/18 Time: 06:22
 Sample: 2010 2016
 Included observations: 7
 Cross-sections included: 36
 Total pool (unbalanced) observations: 241
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	158.6750	28.93671	5.483520	0.0000
INFLASI?	0.046630	0.044003	1.059689	0.2904
PDRB?	1.443775	1.033895	1.396442	0.1639
UMK?	-3.138091	1.269512	-2.471887	0.0141
IPM?	-10.98688	7.878873	-1.394474	0.1645
PP?	2.40E-10	5.73E-10	0.418294	0.6761

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		3.160851	0.7067
Idiosyncratic random		2.036303	0.2933

Weighted Statistics			
R-squared	0.145748	Mean dependent var	16.86543
Adjusted R-squared	0.127572	S.D. dependent var	2.628058
S.E. of regression	2.047430	Sum squared resid	985.1130
F-statistic	8.018893	Durbin-Watson stat	1.958287
Prob(F-statistic)	0.000001		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.031344	Mean dependent var	70.25456
Sum squared resid	3243.821	Durbin-Watson stat	0.594710

Lampiran 4. Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	18.945377	(35,194)	0.0000
Cross-section Chi-square	358.049526	35	0.0000
Period F	8.801421	(6,194)	0.0000
Period Chi-square	58.021878	6	0.0000
Cross-Section/Period F	17.624004	(41,194)	0.0000
Cross-Section/Period Chi-square	374.223769	41	0.0000

Lampiran 5. Uji Model Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	11.499594	5	0.0423

Lampiran 6. Uji Model Lagrange Multiplier

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	319.7706 (0.0000)	0.889120 (0.3457)	320.6597 (0.0000)

Lampiran 7.

Wilayah JATENG	Tahun	X1	X2	X3	X4	X5	Y
Kab.Cilacap	2010	5,65	4,41	698.333,33	64,18	1.519.042.919,00	64,79
	2011	5,27	4,07	718.666,67	64,73	1.361.386.432,00	63,68
	2012	6,87	1,98	773.000,00	65,72	2.100.628.193,00	65,26
	2013	8,37	1,66	854.000,00	66,8	2.130.007.716,00	66,31
	2014	8,19	2,92	956.000,00	67,25	2.709.950.465,00	63,24
	2015	2,63	5,94	1.142.000,00	67,77	2.507.261.952,00	62,39
	2016	2,77	5,06	1.269.000,00	68,6	2.975.482.922,00	66,22
Kab.Banyumas	2010	6,04	5,77	670.000,00	66,87	1.344.626.820,00	69,55
	2011	3,4	6,61	750.000,00	67,45	1.606.036.542,00	65,09
	2012	4,73	5,88	795.000,00	68,06	2.080.207.227,00	65,35
	2013	8,5	6,97	877.500,00	68,55	2.108.991.103,00	63,95
	2014	7,09	5,67	1.000.000,00	69,25	2.660.904.675,00	64,27
	2015	2,52	6,12	1.100.000,00	69,89	2.674.535.084,00	60,17
	2016	2,42	6,05	1.350.000,00	70,49	3.185.133.434,00	65,19
Kab. Purbalingga	2010	7,82	5,67	695.000,00	63,61	776.157.608,00	71,23
	2011	4,47	5,67	765.000,00	64,33	890.244.884,00	72,91
	2012	4,09	5,79	818.500,00	64,94	1.174.181.160,00	76,42
	2013	9,57	5,27	896.500,00	65,53	1.135.760.698,00	73,53
	2014	9,08	4,85	1.023.000,00	66,23	1.478.794.964,00	70,95
	2015	1,62	5,43	1.101.600,00	67,03	1.524.808.370,00	68,05
	2016	2,39	4,75	1.377.500,00	67,46	1.839.180.421,00	71,68
Kab. Banjarnegara	2010	7,13	4,89	662.000,00	60,7	1.037.010.311,00	73,69
	2011	4,73	5,44	730.000,00	61,58	1.031.003.960,00	75,09
	2012	4,55	5,23	765.000,00	62,29	1.291.218.547,00	79,35
	2013	8,35	5,44	835.000,00	62,84	1.240.423.970,00	73,44
	2014	7,78	5,31	920.000,00	63,15	1.673.744.338,00	75,2
	2015	2,97	5,47	1.112.500,00	64,73	1.614.703.372,00	72,61
	2016	2,87	5,41	1.265.000,00	65,52	1.614.703.372,00	70,95
Kab. Kebumen	2010	8,36	4,15	700.000,00	63,08	1.044.687.538,00	70,21
	2011	4,52	6,15	727.500,00	64,05	1.163.205.614,00	72,45
	2012	4,64	4,88	770.000,00	64,47	1.531.268.917,00	75,33
	2013	10,46	4,57	835.000,00	64,86	1.641.809.492,00	71,48
	2014	7,36	5,79	975.000,00	65,67	2.154.579.563,00	74,57
	2015	2,91	6,28	1.157.500,00	66,87	2.045.629.752,00	70,43
	2016	2,71	4,79	1.324.600,00	67,41	2.617.107.342,00	66,84

Wilayah JATENG	Tahun	X1	X2	X3	X4	X5	Y
Kab. Purworejo	2010	7,56	5,01	719.000,00	68,16	901.988.364,00	68,14
	2011	2,52	5,64	755.000,00	69,11	952.042.464,00	66,53
	2012	3,66	4,59	809.000,00	69,4	1.283.835.707,00	68,24
	2013	7,14	4,94	849.000,00	69,77	1.265.028.587,00	70,87
	2014	8,48	4,48	910.000,00	70,12	1.664.439.267,00	68,44
	2015	3,45	5,37	1.165.000,00	70,37	1.669.086.053,00	68,86
	2016	2,66	5,15	1.300.000,00	70,66	2.039.299.301,00	64,48
Kab. Wonosobo	2010	6,06	4,29	715.000,00	62,5	748.321.079,00	73,09
	2011	2,66	5,37	775.000,00	63,07	903.518.947,00	74,68
	2012	3,84	4,70	825.000,00	64,18	1.148.621.893,00	76
	2013	8,82	4,00	880.000,00	64,57	1.106.870.144,00	69,31
	2014	8,44	4,78	990.000,00	65,2	1.574.354.427,00	73,9
	2015	2,71	4,85	1.166.000,00	65,7	1.544.984.911,00	74,75
	2016	2,97	5,25	1.326.000,00	66,19	1.817.724.344,00	72,37
Kab. Magelang	2010	8,25	4,51	752.000,00	63,28	1.096.801.154,00	74,08
	2011	2,64	6,68	802.500,00	64,16	1.179.880.559,00	72,33
	2012	2,59	4,88	870.000,00	64,75	1.475.731.486,00	74,54
	2013	8,34	5,91	942.000,00	65,86	1.513.623.567,00	70,23
	2014	7,91	5,38	1.152.000,00	66,35	2.084.774.335,00	71,76
	2015	3,6	5,03	1.255.000,00	67,13	2.032.872.262,00	69,63
	2016	2,86	5,40	1.410.000,00	67,85	2.373.741.942,00	74,49
Kab. Boyolali	2010	7,34	3,60	748.000,00	68,76	1.004.160.617,00	76,04
	2011	3,35	6,34	800.500,00	69,14	1.114.830.792,00	73,16
	2012	3,45	5,33	836.000,00	69,51	1.352.116.003,00	74,84
	2013	8,21	5,83	895.000,00	69,81	1.429.305.307,00	75,85
	2014	7,45	5,41	1.116.000,00	70,34	1.792.170.694,00	74,82
	2015	2,58	5,91	1.197.800,00	71,74	1.860.250.120,00	74,68
	2016	2,65	5,27	1.403.500,00	72,18	2.163.198.568,00	69,96
Kab. Klaten	2010	7,9	1,73	735.000,00	70,76	1.126.551.305,00	66,71
	2011	1,67	6,29	766.022,00	71,16	1.316.069.211,00	71,28
	2012	3,65	5,71	812.000,00	71,71	1.625.057.001,00	72,19
	2013	7,92	5,96	871.500,00	72,42	1.644.484.890,00	72,68
	2014	7,76	5,84	1.026.600,00	73,19	2.185.618.603,00	70,46
	2015	2,57	5,30	1.170.000,00	73,81	2.086.459.358,00	69,79
	2016	2,31	5,14	1.400.000,00	73,97	2.503.112.200,00	66,93
Kab. Sukoharjo	2010	6,67	4,65	769.500,00	71,53	873.068.398,00	69,13
	2011	2,63	5,88	790.500,00	72,34	932.310.253,00	69,03

Wilayah JATENG	Tahun	X1	X2	X3	X4	X5	Y
	2012	4,22	5,90	843.000,00	72,81	1.338.624.903,00	68,34
	2013	8,42	5,78	902.000,00	73,22	1.281.469.410,00	67,89
	2014	7,93	5,40	1.150.000,00	73,76	1.778.529.385,00	69,38
	2015	2,69	5,69	1.223.000,00	74,53	1.785.620.794,00	67,17
	2016	2,43	5,67	1.396.000,00	75,06	1.923.609.771,00	67,29
Kab. Wonogiri	2010	6,66	5,87	695.000,00	63,9	1.096.453.987,00	71,99
	2011	3	3,58	730.000,00	64,75	1.131.588.847,00	69,12
	2012	3,43	5,94	775.000,00	65,75	1.496.486.849,00	73,09
	2013	8,6	4,78	830.000,00	66,4	1.522.440.153,00	71,98
	2014	7,2	5,26	954.000,00	66,77	1.891.792.645,00	71,52
	2015	2,13	5,40	1.101.000,00	67,76	1.950.391.139,00	69,12
	2016	2,94	5,22	1.293.000,00	68,23	2.259.405.009,00	71,22
Kab. Karanganyar	2010	7,26	5,42	761.000,00	70,31	948.758.983,00	75,03
	2011	3,31	4,95	801.500,00	71	907.584.194,00	72,71
	2012	3,29	5,90	846.000,00	72,76	1.351.366.133,00	72,21
	2013	8,7	5,69	896.500,00	73,33	1.346.818.085,00	71,04
	2014	7,38	5,22	1.060.000,00	73,89	1.878.127.418,00	69,58
	2015	2,4	5,05	1.226.000,00	74,26	1.695.634.199,00	71,18
	2016	1,93	5,37	1.420.000,00	74,9	2.062.584.508,00	70,24
Kab. Sragen	2010	6,77	6,09	724.000,00	67,67	938.226.202,00	74,89
	2011	2,86	6,55	760.000,00	68,12	1.045.666.029,00	72,76
	2012	3,74	6,12	810.000,00	68,91	1.400.524.372,00	75,97
	2013	7,55	6,70	864.000,00	69,95	1.383.879.098,00	73,68
	2014	8,51	5,59	960.000,00	70,52	1.985.175.886,00	71,44
	2015	3,05	6,05	1.105.000,00	71,1	1.793.564.862,00	71,91
	2016	2,49	5,71	1.300.000,00	71,43	2.196.369.841,00	71,12
Kab.Grobogan	2010	7,45	5,05	687.500,00	64,56	1.009.434.119,00	74,91
	2011	1,86	3,19	735.000,00	65,41	1.198.565.439,00	75,53
	2012	4,48	5,08	785.000,00	66,39	1.361.184.323,00	75,19
	2013	7,88	4,57	842.000,00	67,43	1.555.796.215,00	73,13
	2014	8,03	4,07	935.000,00	67,77	1.877.093.463,00	74,65
	2015	3,31	5,96	1.160.000,00	68,05	1.934.005.085,00	71,09
	2016	2,41	4,46	1.305.000,00	68,52	2.634.084.218,00	72,15
Kab.Blora	2010	7,71	5,04	742.000,00	63,02	897.639.762,00	74,56
	2011	2,26	4,42	816.200,00	63,88	1.028.112.977,00	72,42
	2012	3,55	4,90	855.500,00	64,7	1.294.589.356,00	73,63
	2013	7,94	5,36	932.000,00	65,37	1.390.175.126,00	75,1

Wilayah JATENG	Tahun	X1	X2	X3	X4	X5	Y
	2014	7,13	4,39	1.009.000,00	65,84	1.637.166.492,00	68,5
	2015	2,85	5,36	1.180.000,00	66,22	1.727.738.333,00	70,77
	2016	2,14	23,53	1.328.500,00	66,61	1.965.534.711,00	70,21
Kab. Rembang	2010	6,61	4,45	702.000,00	64,53	714.706.998,00	71,37
	2011	2,73	5,19	757.600,00	65,36	800.943.132,00	75,94
	2012	4,28	5,32	816.000,00	66,03	1.017.133.407,00	74,6
	2013	6,88	4,53	896.000,00	66,84	1.127.032.868,00	72,94
	2014	7,59	5,15	985.000,00	67,4	1.496.654.626,00	68,13
	2015	2,66	5,50	1.120.000,00	68,18	1.534.535.519,00	66,97
	2016	1,75	5,23	1.300.000,00	68,6	1.999.726.865,00	70,78
Kab.Pati	2010	6,36	5,11	733.000,00	65,13	1.136.666.399,00	68,88
	2011	2,3	5,91	769.550,00	65,71	1.175.311.308,00	69,73
	2012	3,92	5,93	837.500,00	66,13	1.644.699.979,00	70,72
	2013	7,57	5,97	927.600,00	66,47	1.799.785.932,00	70,77
	2014	8,01	4,64	1.013.027,00	66,99	2.189.494.031,00	68,91
	2015	3,23	5,94	1.176.500,00	68,51	2.072.784.084,00	67,83
	2016	2,31	5,20	1.310.000,00	69,03	2.564.346.771,00	66,83
Kab.Kudus	2010	7,65	4,17	775.000,00	69,22	908.037.628,00	72,03
	2011	3,34	4,24	840.000,00	69,89	981.226.960,00	74,1
	2012	4,77	4,11	889.000,00	70,57	1.259.400.185,00	74,94
	2013	8,31	4,36	990.000,00	71,58	1.530.806.838,00	73,06
	2014	8,59	4,43	1.150.000,00	72	1.934.884.873,00	71,92
	2015	3,28	3,90	1.380.000,00	72,72	1.856.616.762,00	71,04
	2016	2,32	2,53	1.608.200,00	72,94	2.161.004.955,00	71,75
Kab.Jepara	2010	6,24	4,52	702.000,00	66,76	964.756.188,00	70,17
	2011	3,59	4,92	758.000,00	67,63	1.046.553.538,00	71,75
	2012	4,52	5,86	800.000,00	68,45	1.411.874.411,00	71,8
	2013	7,95	5,39	875.000,00	69,11	1.351.036.224,00	70,19
	2014	9,87	4,81	1.000.000,00	69,61	1.740.163.429,00	68,12
	2015	4,57	5,04	1.150.000,00	70,02	1.751.447.136,00	68,13
	2016	3,45	5,02	1.350.000,00	70,25	2.242.727.065,00	69,85
Kab.Demak	2010	6,87	4,12	813.400,00	66,02	909.538.178,00	68,2
	2011	3,49	5,39	847.987,00	66,84	1.043.996.821,00	68,27
	2012	4,1	4,46	893.000,00	67,55	1.326.113.402,00	70,13
	2013	8,22	5,27	995.000,00	68,38	1.318.966.842,00	68,11
	2014	8,69	4,29	1.280.000,00	68,95	1.799.198.399,00	67,86
	2015	2,8	5,93	1.535.000,00	69,75	1.654.231.698,00	68,84

Wilayah JATENG	Tahun	X1	X2	X3	X4	X5	Y
	2016	2,27	5,04	1.745.000,00	70,1	1.963.789.242,00	67,73
Kab.Semarang	2010	7,07	4,90	824.000,00	69,58	899.749.562,00	76,48
	2011	3,29	6,27	880.000,00	70,35	952.893.369,00	75,92
	2012	4,56	6,03	941.600,00	70,88	1.356.457.921,00	76,59
	2013	8,11	5,97	1.051.000,00	71,29	1.141.092.763,00	74,14
	2014	8,63	5,85	1.208.200,00	71,65	1.681.541.886,00	75,34
	2015	2,85	5,52	1.419.000,00	71,89	1.632.541.723,00	75,33
	2016	2,39	5,27	1.610.000,00	72,4	1.953.949.034,00	76,37
Kab. Temanggung	2010	7,35	4,31	709.500,00	63,08	715.852.471,00	77,57
	2011	2,42	6,09	779.000,00	64,14	743.104.085,00	75,91
	2012	4,73	4,27	866.000,00	64,91	1.013.063.821,00	77,33
	2013	7,01	5,20	940.000,00	65,52	1.107.506.970,00	76,7
	2014	7,81	5,03	1.050.000,00	65,97	1.372.335.673,00	76,73
	2015	2,74	5,21	1.178.000,00	67,07	1.506.620.232,00	75,47
	2016	2,41	5,00	1.313.000,00	67,6	1.808.201.700,00	74,37
Kab. Kendal	2010	5,89	5,97	780.000,00	66,23	975.791.817,00	71,03
	2011	3,49	6,57	843.750,00	66,96	1.100.559.754,00	70,7
	2012	3,89	5,21	893.000,00	67,55	1.319.126.868,00	72,81
	2013	6,9	6,22	953.100,00	67,98	1.399.926.354,00	71,86
	2014	8,43	5,14	1.206.000,00	68,46	1.788.407.581,00	71,22
	2015	4,13	5,25	1.383.450,00	67,57	1.700.696.392,00	65,7
	2016	2,47	5,60	1.639.600,00	70,11	2.006.588.404,00	66,49
Kab.Batang	2010	6,62	4,97	745.000,00	61,64	703.228.643,00	72,66
	2011	3,01	6,12	805.000,00	62,59	818.230.341,00	72,72
	2012	3,83	4,62	880.000,00	63,09	1.040.700.900,00	72,45
	2013	8,08	5,88	970.000,00	63,6	1.056.723.935,00	70,97
	2014	7,66	5,31	1.146.000,00	64,07	1.357.910.654,00	71,67
	2015	2,94	5,42	1.270.000,00	65,46	1.335.329.214,00	67,62
	2016	2,24	4,93	1.467.500,00	66,38	1.680.655.817,00	67,7
Kab.Pekalonagn	2010	6,54	4,27	760.000,00	63,75	802.023.274,00	70,42
	2011	2,65	5,66	810.000,00	64,72	904.476.121,00	73,17
	2012	2,96	4,81	873.000,00	65,33	1.157.882.076,00	71,48
	2013	8,18	5,99	962.000,00	66,26	1.221.216.817,00	69,37
	2014	8,32	4,95	1.145.000,00	66,98	1.546.716.072,00	69,52
	2015	3,42	4,78	1.271.000,00	67,4	1.614.021.597,00	64,6
	2016	2,96	5,16	1.463.000,00	67,71	1.889.826.166,00	70,98
Kab.Pemalang	2010	7,38	4,94	675.000,00	58,64	1.014.755.706,00	65,1

Wilayah JATENG	Tahun	X1	X2	X3	X4	X5	Y
	2011	2,8	5,01	725.000,00	59,66	1.014.326.814,00	64,17
	2012	4,04	5,32	793.000,00	60,78	1.414.467.128,00	68,3
	2013	6,52	5,57	908.000,00	61,81	1.490.926.937,00	66,62
	2014	7,38	5,52	1.066.000,00	62,35	1.886.225.889,00	69,15
	2015	3,52	5,58	1.193.400,00	63,7	1.895.458.849,00	63,63
	2016	2,33	5,38	1.325.000,00	64,17	1.856.437.319,00	65,57
Kab.Tegal	2010	6,44	4,83	687.000,00	61,14	995.702.616,00	64,43
	2011	2,74	6,39	725.000,00	61,97	1.136.784.748,00	65,17
	2012	4,13	5,23	795.000,00	62,67	1.468.262.982,00	64,32
	2013	7,79	6,73	850.000,00	63,5	1.488.649.903,00	62,56
	2014	8,48	5,03	1.000.000,00	64,1	1.994.456.014,00	63,65
	2015	3,64	5,45	1.155.000,00	65,04	2.136.841.443,00	60,91
	2016	2,67	6,37	1.373.000,00	65,84	2.661.362.542,00	66,41
Kab.Brebes	2010	6,04	4,94	681.000,00	59,49	1.366.286.438,00	71,27
	2011	3,09	6,65	717.000,00	60,51	1.446.951.346,00	63,61
	2012	4,61	4,58	775.000,00	60,92	1.516.493.085,00	64,2
	2013	9,83	5,91	859.000,00	61,87	1.907.790.663,00	73,03
	2014	6,2	5,30	1.000.000,00	62,55	2.425.062.659,00	65,18
	2015	3,08	5,98	1.166.550,00	63,18	2.422.986.706,00	62,81
	2016	2,84	4,87	1.310.000,00	63,98	2.963.732.019,00	67,42
Kota Magelang	2010	6,8	6,12	745.000,00	73,99	450.391.259,00	68,46
	2011	4,15	6,11	795.000,00	74,47	470.321.077,00	71,83
	2012	3,26	5,37	837.000,00	75	654.291.948,00	69,45
	2013	7,79	6,04	915.900,00	75,29	622.827.848,00	68,37
	2014	7,92	4,98	1.145.000,00	75,79	845.558.260,00	68,49
	2015	2,7	5,11	1.211.000,00	76,39	781.867.908,00	64,35
	2016	2,25	5,17	1.341.000,00	77,16	888.502.644,00	65,32
Kota Surakarta	2010	6,65	5,94	785.000,00	77,45	974.113.725,00	66,81
	2011	1,93	6,42	826.252,00	78	1.077.852.809,00	67,22
	2012	2,87	5,58	864.450,00	78,44	1.368.468.596,00	70,43
	2013	8,31	6,25	974.000,00	78,89	1.432.215.569,00	72,1
	2014	8,01	5,28	1.170.000,00	79,34	1.692.022.711,00	68,48
	2015	2,56	5,44	1.222.400,00	80,14	1.589.045.771,00	70,12
	2016	2,15	5,32	1.418.000,00	80,76	1.870.991.794,00	66,1
Kota Salatiga	2010	6,65	5,01	803.185,00	78,35	475.264.083,00	67,64
	2011	2,84	6,58	843.469,00	78,76	479.622.923,00	67,83
	2012	4,12	5,53	901.396,00	79,1	758.567.936,00	68,85

Wilayah JATENG	Tahun	X1	X2	X3	X4	X5	Y
	2013	7,67	6,30	1.209.100,00	79,37	657.043.918,00	67,96
	2014	7,84	5,57	1.423.500,00	79,98	924.980.506,00	65,27
	2015	2,61	5,17	1.287.000,00	80,96	811.389.283,00	62,7
	2016	2,19	5,23	1.450.953,00	81,14	935.038.576,00	70,53
Kota Semarang	2010	7,11	5,87	939.756,00	76,96	1.936.682.191,00	67
	2011	2,87	6,58	961.323,00	77,58	2.024.001.571,00	69,24
	2012	0,41	5,97	991.500,00	78,04	2.741.394.958,00	67,84
	2013	8,19	6,25	980.000,00	78,68	2.673.923.457,00	67,1
	2014	8,53	6,31	1.165.000,00	79,24	4.078.734.286,00	68,43
	2015	2,56	5,80	1.685.000,00	80,23	3.654.580.506,00	66,96
	2016	2,32	5,69	1.909.000,00	81,19	4.221.348.359,00	69,87
Kota Pekalongan	2010	6,77	5,51	760.000,00	68,95	465.483.846,00	72,3
	2011	2,45	5,49	810.000,00	69,54	476.315.333,00	68,48
	2012	3,55	5,61	895.500,00	69,95	660.358.654,00	69,73
	2013	7,4	5,91	860.000,00	70,82	645.702.927,00	66,22
	2014	7,82	5,48	1.044.000,00	71,53	852.946.108,00	69,32
	2015	3,46	5,00	1.291.000,00	72,69	867.807.179,00	67,47
	2016	2,94	5,36	1.500.000,00	73,32	929.212.237,00	69,28
Kota Tegal	2010	6,73	4,61	700.000,00	69,33	546.493.533,00	70,35
	2011	2,58	6,47	735.000,00	70,03	519.382.079,00	63,4
	2012	0,4	4,21	795.000,00	70,68	724.122.092,00	63,45
	2013	5,8	5,67	914.275,68	71,44	692.361.726,00	70,97
	2014	7,4	5,04	1.066.603,43	72,2	945.569.657,00	65,09
	2015	3,95	5,45	1.206.000,00	72,96	968.519.382,00	65,17
	2016	2,71	5,46	1.385.000,00	73,55	1.138.477.033,00	66,33

Keterangan :

- X1 : Inflasi
- X2 : PDRB
- X3 : UMK
- X4 : IPM
- X5 : APBD
- Y : Penyebaran Tenaga Kerja